LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI KENDARI

2023



PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR KENDARI KELAS IA

Jl. Mayjen Sutoyo No.37 Kendari Sulawesi Tenggara
Website : www.pn-kendari.go.id Tlp. 0401-3121714,
Email : peen.kendari@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia- Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kendari dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Pelaksanaan Kegiatan ini dapat rampung tepat waktu. Penyusunan Laporan ini berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4108/SEK/OT.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 untuk Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023. Laporan ini menggambarkan situasi dan kondisi serta perkembangan Pengadilan Negeri Kendari selama Tahun 2023, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Laporan ini menjadi pelengkap bahan penyusunan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bahan evaluasi untuk penyusunan program kerja selanjutnya. Besar harapan kami untuk terwujudnya progesivitas pelayanan di Bidang Teknis dan Non Teknis dari tahun ke tahun dengan berpedoman pada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu 'Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung' serta meyakini kapabilitas kinerja yang sesuai dengan ekspetasi rencana kerja.

Demikian, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kendari dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Kendari dan bermanfaaat bagi masyarakat.

Kendari, 09 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Kendari

SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Pengantar ……...i
Daftar Isi ……..…ii
Daftar Tabel ……..…iii
Daftar Gambar……..…iv
Bab I Pendahuluan……1
BAB II A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Kendari
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama……6
- Keadaan Perkara Tingkat Banding……8
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi……...8
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali……9

B. Penyelesaian Perkara
- Jumlah Sisa perkara yang putus……...9
- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu……..…..10
- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK……..……...10
- Jumlah Perkara perdata yang berhasil mediasi……..…..12
- Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi……..…..12

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)
- Posbakum…….…13
- Sidang keliling/pelayanan terpadu……...…13
- Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara)……...……13

BAB III Sumber Daya Manusia
A. Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/Pendidikan...14
B. Mutasi…….....19
C. Promosi……..…..20
D. Pensiun/Meninggal Dunia…….....21
E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)….22
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, Teknologi Informasi
A. Pengelolaan Keuangan…….....23
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana…….....24
C. Pengelolaan Teknologi Informasi…….....28
- Implementasi e-Court di lingkungan Peradilan Umum……32
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum……34

BAB V Peningkatan Pelayanan Publik
A. Akreditasi Penjaminan Mutu……..…....36
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)……..36
C. Inovasi Pelayanan Publik……..38
BAB VI Pengawasan
A. Internal…….…….54
B. Evaluasi…….…56
BAB VII Penutup
A. Kesimpulan…….....58
B. Rekomendasi…….60
Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Keseluruhan di Tingkat Pertama 6

Tabel 2.2. Keadaan Perkara Perdata di Tingkat Pertama 7

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Pidana di Tingkat Pertama 7

Tabel 2.4. Keadaan Perkara Tipikor di Tingkat Pertama 7

Tabel 2.5. Keadaan Perkara PHI di Tingkat Pertama 7

Tabel 2.6. Keadaan Perkara Tingkat Banding 8

Tabel 2.7. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 8

Tabel 2.8. Keadaan Perkara Tingkat PK 9

Tabel 2.9. Keadaan Sisa Perkara yang Diputus 10

Tabel 2.10. Perkara yang Diputus Tepat Waktu 10

Tabel 2.11. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 11

Tabel 2.12 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 11

Tabel 2.13 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 11

Tabel 2.14. Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi 12

Tabel 2.15. Perkara anak yang berhasil melalui diversi 12

Tabel 3.1. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan 14

Tabel 3.2. Tabel Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan dan Golongan 17

Tabel 3.3. Tabel Nama Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Kendari 18

Tabel 3.4. Daftar Mutasi Keluar 19

Tabel 3.5. Daftar Mutasi Masuk 20

Tabel 3.6. Daftar Promosi 21

Tabel 3.7. Daftar Meninggal Dunia 22

Tabel 3.9. Daftar Pegawai yang mengikuti Diklat/Pelatihan 22

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran DIPA 005.01.2.099659.2023 23

Tabel 4.2. Realisasi Anggaran DIPA 005.03.2.099660.2023 23

Tabel 4.3. PNBP DIPA 005.01.2000.099659 24

Tabel 4.4. PNBP DIPA 005.03.2000.099660 24

Tabel 4.5. Data Aset Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 25

Tabel 4.6 Data Ruang Kerja 26

Tabel 4.7. Daftar Ruangan Pendukung..... 26
Tabel 4.8. Daftar Ruangan Pendukung pada Tipikor..... 27
Tabel 4.9. Daftar Ruangan Pendukung..... 27
Tabel 4.10. Daftar Perangkat Keras (*Hardware*)..... 31
Tabel 4.11. Daftar Capaian SIPP PN Kendari Tahun 2023..... 34
Tabel 6.1. Data Hakim Pengawas Bidang 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kantor Pengadilan Negeri Kendari di Tipulu dan Baruga 1

Gambar 3.1. SDM Berdasarkan Pendidikan 18

Gambar 3.2. SDM Berdasarkan Golongan dan Ruang 19

Gambar 5.1. Piagam Penghargaan Nominasi Finalis dan Harapan III Lomba PTSP 38

Gambar 5.1. Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat 39

Gambar 5.3. Youtube, Facebook dan Instagram 40

Gambar 5.4. Aplikasi PTSP 42

Gambar 5.5. Layar Monitor Informasi 42

Gambar 5.6. LCD Monitor Terhubung dengan SIPP 43

Gambar 5.7. Pojok *E-Court* 43

Gambar 5.8. Leaflet Informasi Layanan 44

Gambar 5.9. EDC BRI 44

Gambar 5.10. Antrian Pelayanan PTSP 45

Gambar 5.11. Layanan Buku Braille 45

Gambar 5.12. Website Layanan Disabilitas 46

Gambar 5.13. Kompensasi Untuk Pengguna Layanan 46

Gambar 5.14. Sarana dan Prasarna Disabilitas 47

Gambar 5.15. Aplikasi E-Simpel 48

Gambar 5.17. Si Ulandari 49

Gambar 5.18. Aplikasi E-Cepat 49

Gambar 5.19. Aplikasi V-LARI 49

Gambar 5.20. Arena Bermain PN Kendari 50

Gambar 5.21. Aplikasi E-Pakta 50

Gambar 5.22. Aplikasi E-Paduka 51

Gambar 5.23. Ruang Perawatan 51

Gambar 5.24. Ruang Laktasi 52

Gambar 5.25. Ruang *Broadcast* 52

Gambar 5.26. Ruang Terbuka Tamu Online 53

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan



Gambar 1.1. Kantor Pengadilan Negeri Kendari di Tipulu dan Baruga

Pengadilan Negeri Kendari merupakan satuan kerja Lembaga Peradilan Kota yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di bawah Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang memiliki *locus delicti* di Kota Kendari.

Pengadilan Negeri Kendari sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mempunyai tugas pokok adalah sebagai berikut :

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan baik perkara pidana dan perdata;
2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah daerah, apabila diminta dan melaksanakan tugas serta kewenangan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara atau sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya di wilayah hukum Kota Kendari dan sekitarnya;
3. Memberikan kontribusi hukum dalam upaya pembangunan hukum nasional.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Pengadilan Negeri Kendari merumuskan kebijakan-kebijakan peradilan. Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan peradilan, Pengadilan Negeri Kendari mengacu pada kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menaunginya.

Salah satu kebijakan peradilan yang mendasar untuk merespon ekspektasi masyarakat yang menginginkan lembaga peradilan yang agung sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yaitu Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya, adalah Penyatuan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung RI.

Selain itu, diterbitkan juga cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Cetak biru pembaharuan Pengadilan 2010-2035 ini memuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima tahun) mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan,
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional,
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis TI (Teknologi Informasi) terpadu.

Dalam melaksanakan program Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035 ini, terdapat beberapa agenda yang menjadi prioritas, yaitu :

1. Meningkatkan upaya pemulihan kepercayaan dunia hukum dan masyarakat terhadap profesionalisme, integritas dan kewibawaan serta martabat peradilan;
2. Meningkatkan kualitas pengawasan internal dan eksternal dari masyarakat serta upaya pemberantasan KKN;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penggunaan teknologi baru di setiap pengadilan;
4. Meningkatkan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman.

B. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kendari. Visi Pengadilan Negeri Kendari mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KENDARI YANG AGUNG"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Kendari, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kendari;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kendari;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kendari.

C. Rencana Strategis

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kendari tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai keefektifan dan keefesiensian.

Selanjutnya rencana strategis Pengadilan Negeri Kendari 2020-2024 digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Kendari yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPNJP (Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang) 2005-2025 dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024. Selain itu, rencana strategis ini digunakan sebagai pengendalian kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Kendari dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Adapun dasar penyusunan strategis tersebut dapat diimplementasikan melalui 2 (dua) strategi yaitu :

1. Strategi Stabilitas

   Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan, menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu, meningkatkan segala upaya dan dana serta diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Kendari pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi Efisiensi

   Strategi efisiensi berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Kendari yang tidak mungkin dipertahankan keberadaannya.

Sedangkan dalam perumusannya, rencana strategis Pengadilan Negeri Kendari 2020-2024 di dasarkan pada IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Negeri Kendari. IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Negeri Kendari ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 101/KPN.W23-U1/SK.OT1.2/I/2024 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kendari.

Indikator kinerja utama adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Secara garis besar sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kendari adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

BAB II KEADAAN PERKARA

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari suatu instansi, termasuk di dalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Dalam konteks itulah, Pengadilan Negeri Kendari sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (institusi Pemerintah) yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 sebagai hasil evaluasi terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas struktural.

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Kendari

- **Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

  Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Kendari pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan rasio penanganan perkara dari Tahun 2022 sebesar 82,30% menjadi 86,48% di Tahun 2023. Jumlah perkara Pengadilan Negeri Kendari yang diterima pada tahun 2023 sebanyak 1057 perkara, sisa perkara pada tahun 2022 sebanyak 193 perkara sehingga beban yang dimiliki Pengadilan Negeri Kendari sebanyak 1.250 perkara, dengan perkara yang diputus sebanyak 1.081 perkara sehingga perkara sisa perkara di Tahun 2023 yang masih dalam proses persidangan yaitu sebanyak 169 perkara. Berikut tabel keadaan perkara di Pengadilan Negeri Kendari :

- **Keadaan Keseluruhan Perkara di Pengadilan Negeri Kendari**

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut/ Gugur 2023	Sisa Tahun 2023
Perdata	58	352	410	366	58	44
Pidana	122	635	757	653	0	104
Tipikor	11	47	58	38	1	20
PHI	2	23	25	24	2	1
Jumlah	**193**	**1.057**	**1.250**	**1.081**	**61**	**169**

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Keseluruhan di Tingkat Pertama

- **Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kendari**

Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut/ Gugur 2023	Sisa Tahun 2023
Gugatan	51	146	197	126	30	41
Gugatan Sederhana	1	10	11	9	2	0
Permohonan	1	194	195	170	25	0
Permohonan Konsinyasi	2	0	2	0	0	2
Perlawanan/ Bantahan	3	2	5	3	1	1
Jumlah	**58**	**352**	**410**	**308**	**58**	**44**

Tabel 2.2. Keadaan Perkara Perdata di Tingkat Pertama

- **Keadaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kendari**

Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut/ Gugur 2023	Sisa Tahun 2023
Pidana Biasa	122	555	677	577	0	100
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	18	18	18	0	0
Pidana Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
Pidana Anak	0	46	46	42	0	4
Pidana Praperadilan	0	16	16	16	0	0
Jumlah	**122**	**635**	**757**	**653**	**0**	**104**

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Pidana di Tingkat Pertama

- **Keadaan Perkara Tipikor di Pengadilan Negeri Kendari**

Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut/ Gugur 2023	Sisa Tahun 2023
Tipikor	11	47	58	37	1	20
Jumlah	**11**	**47**	**58**	**37**	**1**	**20**

Tabel 2.4. Keadaan Perkara Tipikor di Tingkat Pertama

- **Keadaan Perkara PHI di Pengadilan Negeri Kendari**

Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut/ Gugur 2023	Sisa Tahun 2023
PHI	2	23	25	22	2	1
JUMLAH	**2**	**23**	**25**	**22**	**2**	**1**

Tabel 2.5. Keadaan Perkara PHI di Tingkat Pertama

- **Keadaan Perkara Tingkat Banding**

Jenis Perkara	Sisa Perkara Banding Tahun 2022	Perkara Putus di Tingkat Pertama yg Mengajukan Banding	Jumlah Beban	Cabut	Putus di PT	Sisa Perkara Banding 2023
Gugatan	12	53	65	0	59	6
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Permohonan	0	0	0	0	0	0
Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
Perlawanan/ Bantahan	1	3	4	0	3	1
Pidana Biasa	5	50	55	1	51	3
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
Pidana LL	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	2	2	0	2	0
Pidana Pra Peradilan	0	0	0	0	0	0
TIPIKOR	2	10	12	0	9	3
PHI	0	0	0	0	0	0
Jumlah	**20**	**118**	**138**	**1**	**124**	**13**

Tabel 2.6. Keadaan Perkara Tingkat Banding

- **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Jenis Perkara	Perkara putus di Tingkat Pertama 2023	Perkara yang Diajukan Kasasi 2023	Cabut	Putus di MA	Sisa Perkara Kasasi 2023
Gugatan	156	33	0	0	33
Gugatan Sederhana	11	0	0	0	0
Permohonan	195	0	0	0	0
Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0
Perlawanan/ Bantahan	4	2	1	0	1
Pidana Biasa	577	41	0	8	33
Pidana Singkat	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	18	0	0	0	0
Pidana LL	0	0	0	0	0
Pidana Anak	42	1	0	1	0
Pidana Pra Peradilan	16	0	0	0	0

TIPIKOR	38	10	0	0	10
PHI	24	10	0	4	6
Jumlah	**1.081**	**97**	**1**	**13**	**83**

Tabel 2.7. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

- **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**

Jenis Perkara	Perkara Putus di Tingkat Pertama 2023	Perkara yang Diajukan PK 2023	Cabut	Putus	Sisa Perkara PK 2023
Gugatan	156	10	0	0	10
Gugatan Sederhana	11	0	0	0	0
Permohonan	195	0	0	0	0
Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0
Perlawanan/ Bantahan	4	0	0	0	0
Pidana Biasa	577	11	0	6	5
Pidana Singkat	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	18	0	0	0	0
Pidana LL	0	0	0	0	0
Pidana Anak	42	0	0	0	0
Pidana Pra Peradilan	16	0	0	0	0
TIPIKOR	38	7	0	1	6
PHI	24	0	0	0	0
Jumlah	**1.081**	**28**	**0**	**7**	**21**

Tabel 2.8. Keadaan Perkara Tingkat PK

B. Penyelesaian Perkara

- **Jumlah Sisa Perkara yang Diputus**

Jenis Perkara	Sisa Perkara Belum Putus 2022	Perkara 2022 yang diputus 2023	Sisa Perkara 2022 yang belum putus di 2023
Gugatan	51	51	0
Gugatan Sederhana	1	1	0
Permohonan	1	1	0
Permohonan Konsinyasi	2	0	2
Perlawanan/Bantahan	3	3	0
Pidana Biasa	122	122	0
Pidana Singkat	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0

Pidana LL	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0
Pidana Pra Peradilan	0	0	0
TIPIKOR	11	11	0
PHI	2	2	0
JUMLAH	**193**	**191**	**2**

Tabel 2.9. Keadaan Sisa Perkara yang Diputus

- **Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu**

Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu 2022	Masuk Tahun 2023	Jumlah Beban	Putus	Putus Tepat Waktu	Sisa
Gugatan	51	146	197	156	114	41
Gugatan Sederhana	1	10	11	11	11	0
Permohonan	1	194	195	195	195	0
Permohonan Konsinyasi	2	0	2	0	0	2
Perlawanan/ Bantahan	3	2	5	4	3	1
Pidana Biasa	122	555	677	577	568	100
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	18	18	18	18	0
Pidana LL	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	46	46	42	41	4
Pidana Pra Peradilan	0	16	16	16	16	0
TIPIKOR	11	47	58	38	37	20
PHI	2	23	25	24	23	1
JUMLAH	**193**	**1.057**	**1.250**	**1.081**	**1.026**	**169**

Tabel 2.10. Perkara yang Diputus Tepat Waktu

- **Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK**

  - **Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Jenis Perkara	Perkara Putus di PN	Perkara Diajukan Banding	Perkara Putus Banding	Perkara Tidak Mengajukan Banding
Gugatan	156	53	47	103
Gugatan Sederhana	11	0	0	11
Permohonan	195	0	0	195

Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0
Perlawanan/ Bantahan	4	3	3	1
Pidana Biasa	577	50	46	527
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat	18	0	0	18
Pidana LL	0	0	0	0
Pidana Anak	42	2	2	40
Pidana Pra Peradilan	16	0	0	16
TIPIKOR	38	10	7	28
PHI	24	0	0	24
Jumlah	**1.081**	**118**	**105**	**963**

Tabel 2.11. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

- **Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Jenis Perkara	Perkara Putus di PN	Perkara Diajukan Kasasi	Perkara Putus Kasasi	Perkara Tidak Mengajukan Kasasi
Gugatan	156	33	0	123
Gugatan Sederhana	11	0	0	11
Permohonan	195	0	0	195
Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0
Perlawanan/ Bantahan	4	2	0	2
Pidana Biasa	577	41	8	536
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat	18	0	0	18
Pidana LL	0	0	0	0
Pidana Anak	42	1	1	41
Pidana Pra Peradilan	16	0	0	16
TIPIKOR	38	10	0	28
PHI	24	10	4	14
Jumlah	**1.081**	**97**	**13**	**984**

Tabel 2.12. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

➢ **Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Jenis Perkara	Perkara Putus di PN	Perkara Diajukan PK	Perkara Putus PK	Perkara Tidak Mengajukan PK
Gugatan	156	10	0	146
Gugatan Sederhana	11	0	0	11
Permohonan	195	0	0	195
Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0
Perlawanan/ Bantahan	4	0	0	4
Pidana Biasa	577	11	6	566
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat	18	0	0	18
Pidana LL	0	0	0	0
Pidana Anak	42	0	0	42
Pidana Pra Peradilan	16	0	0	16
TIPIKOR	38	7	0	31
PHI	24	0	0	24
Jumlah	**1.081**	**28**	**6**	**1.053**

Tabel 2.13. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

- **Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi**

No	Perkara	Sisa Mediasi 2022	Mediasi Masuk 2023	Jumlah Beban	Mediasi Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Mediasi Berjalan
1.	Gugatan	5	105	110	6	99	2	3

Tabel 2.14. Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi

- **Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi**

No	Perkara	Perkara Pidana Anak Masuk 2023	Perkara Yang Diajukan Diversi 2023	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil	Diversi Tidak Dapat Dilaksanakan /Proses
1.	Pidana Anak	46	10	4	6	36

Tabel 2.15. Perkara anak yang berhasil melalui diversi

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)

- **Posbakum**

  Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

  Pengadilan Negeri Kendari telah melaksanakan Posbakum melalui Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Kendari dengan LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH-Kasasi) Sultra pada tanggal 30 November 2022, dengan anggaran pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 48.000.000 dan untuk honor advokat/pengacara piket dengan jumlah target volume output sebesar 480 jam layanan (1 Org x 2 jam x 20 Hari x 12 Bulan). Dari anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 48.000.000 (100%) dari pagu anggaran dengan 480 jam layanan dengan total keseluruhan pengguna layanan sebanyak 31 orang pada Tahun 2023.

- **Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

  Sidang keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada masyarakat. Tujuan dilakukannya sidang keliling adalah untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Negeri sehingga dapat menghemat biaya dan menghemat waktu agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dan pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Kendari tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk sidang keliling/pelayanan terpadu.

- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

  Perkara prodeo (layanan pembebasan biaya perkara) merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Kendari tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo).

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan aset untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendari sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat para pencari keadilan.

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

- Berikut Daftar Pegawai Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan kepangkatan sebagai berikut :

NO.	JABATAN	JUMLAH
1.	Ketua	1 Orang
2.	Wakil Ketua	1 Orang
3.	Hakim Karier	8 Orang
4.	Hakim Ad Hoc	8 Orang
5.	Panitera	1 Orang
6.	Sekretaris	1 Orang
7.	Panmud	4 Orang
8.	Kasub	2 Orang
9.	Panitera Pengganti	17 Orang
10.	Juru Sita	4 Orang
11.	Juru Sita Pengganti	2 Orang
12.	Pejabat Fungsional Kesekretariatan	1 Orang
13.	Staf Pelaksana	13 Orang
	TOTAL	**63 Orang**

Tabel 3.1. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

- Berikut detail Daftar Pegawai Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan kepangkatan sebagai berikut :

NO.	N A M A / N I P	PANGKAT / GOL.	PENDIDIKAN
1.	Dr. I MADE SUKANADA, S.H., M.H. NIP. 19661116 199212 1 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	DOKTOR
2.	SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H. NIP. 19740830 199903 1 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	MAGISTER
3.	H BUDI WINATA, S.H., M.H. NIP. 19730522 199903 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	MAGISTER

4.	ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H., M.H. NIP. 19741120 199903 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	MAGISTER
5.	Hj. ROSDIANA.L, S.E. NIP. 19660102 199603 2 001	Pembina Tk. I (IV/b)	SARJANA
6.	ANDI EDDY VIYATA, S.H. NIP. 19751130 200112 1 003	Pembina Tk. I (IV/b)	SARJANA
7.	FRANS WEMPIE SUPIT PANGEMANAN, S.H., M.H. NIP. 19760126 200112 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	MAGISTER
8.	ARMIN, S.H., M.H. NIP. 19651231 198903 1 036	Pembina Tk. I (IV/b)	MAGISTER
9.	ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H., M.H. NIP. 19790708 200212 1 004	Pembina (IV/a)	MAGISTER
10.	WAHYU BINTORO, S.H. NIP. 19760823 200212 1 002	Pembina (IV/a)	SARJANA
11.	SERA ACHMAD, S.H., M.H. NIP. 19791025 200502 2 001	Pembina (IV/a)	MAGISTER
12.	BERNADETHE NISAWATY, S.H., M.H. NIP. 19720811 199903 2 003	Pembina (IV/a)	MAGISTER
13.	MUHAMMAD SAIN W, S.H., M.H. NIP. 19691024 199203 1 001	Penata Tk. I (III/d)	MAGISTER
14.	SOFYAN, S.H. NIP. 19700807 199203 1 004	Penata Tk. I (III/d)	SARJANA
15.	ERNI WAHID, S.H. NIP. 19660106 198603 2 003	Penata Tk. I (III/d)	SARJANA
16.	HASRIM, S.H. NIP. 19730424 199303 1 006	Penata Tk. I (III/d)	SARJANA
17.	DJAYADI, S.H. NIP. 19681015 198903 1 004	Penata Tk. I (III/d)	SARJANA
18.	SJAHRUL, S.H. NIP. 19720105 199303 1 003	Penata Tk. I (III/d)	SARJANA
19.	LAODE ALAM WUNA KARMAN, S.H. NIP. 19810112 200704 1 001	Penata Tk. I (III/d)	SARJANA
20.	ENTENG, S.H. NIP. 19790405 200112 1 004	Penata Tk. I (III/d)	SARJANA
21.	BUDIMAN, S.E., M.E. NIP. 19810520 201001 1 027	Penata Tk. I (III/d)	MAGISTER

22.	AKIRA HASBULLAH ISAMU, S.E. NIP. 19811118 200904 1 002	Penata Tk. I (III/d)	SARJANA
23.	WA ODE NUR IQAMAH, S.T. NIP. 19841218 200904 2 009	Penata Tk. I (III/d)	SARJANA
24.	MISRAWATI, S.E., M.A.P. NIP. 19850316 200904 2 004	Penata Tk. I (III/d)	MAGISTER
25.	HANS PRAYUGOTAMA, S.H. NIP. 19860210 200912 1 004	Penata Tk. I (III/d)	MAGISTER
26.	FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H. NIP. 19750210 200912 1 003	Penata Tk. I (III/d)	SARJANA
27.	NURDIN, S.H., M.H. NIP. 19840530 200912 1 004	Penata Tk. I (III/d)	MAGISTER
28.	MUJIRUN, S.H. NIP. 19790416 200212 1 002	Penata Tk. I (III/d)	SARJANA
29.	DARWIS, S.H. NIP. 19830103 200912 1 006	Penata Tk. I (III/d)	SARJANA
30.	ARJUNA MALAKA, S.E. NIP. 19730329 200604 1 013	Penata Tk. I (III/d)	SARJANA
31.	PUTU NOVAINI ULANDARI, S.H. NIP. 19861124 201101 2 014	Penata (III/c)	SARJANA
32.	ARRIYANI, S.H. NIP. 19860211 200502 2 001	Penata (III/c)	SARJANA
33.	SAHIR R. NIP. 19650803 199103 1 005	Penata (III/c)	SMA
34.	A. DEWI ZUKHRUFI, S.H. NIP. 19870823 200604 2 001	Penata (III/c)	SARJANA
35	IRAYANA, S.H. NIP. 19790617 200604 2 004	Penata (III/c)	SARJANA
36.	FRANSISKA SOKO, S.H. NIP. 19740225 200604 2 001	Penata (III/c)	SARJANA
37.	SARLAN, S.H. NIP. 19870110 200604 1 002	Penata (III/c)	SARJANA
38.	RISNAWATI, S.H. NIP. 19790426 200502 2 001	Penata (III/c)	SARJANA
39.	LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, S.H. NIP. 19860319 200604 1 001	Penata (III/c)	SARJANA
40.	LA ODE ALISABIR, S.H. NIP. 19900127 200912 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	SARJANA

41.	SYAHRAENI LOVELYA N, S.H. NIP. 19871028 200604 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	SARJANA
42.	SUMARDIN KETE, S.SI. NIP. 19790616 200604 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	SARJANA
43.	AMELIA BURHANUDDIN, A.Md, S.H. NIP. 19850113 200912 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	SARJANA
44.	NIRMALASARI IDRIS, S.H., M.H NIP. 19890123 200912 2 002	Penata Muda (III/a)	MAGISTER
45.	RUDY M. PARDOSI, S.H. NIP. 19900928 202203 1 004	Penata Muda (III/a)	SARJANA
46.	A. HAKAM MUSLIM, S.H. NIP. 19930313 202203 1 005	Penata Muda (III/a)	SARJANA
47.	ASRI NURUL UTAMI, S.A.P. NIP. 19950109 202203 2 004	Penata Muda (III/a)	SARJANA
48.	WAHYU NUGROHO, S.H. NIP. 19970629 202203 1 007	Penata Muda (III/a)	SARJANA
49.	M I N NIP. 19680823 199303 1 004	Pengatur Tk. I (II/d)	S M A
50.	ADE DAYANULLLAH NIP. 19870101 200912 1005	Pengatur Tk. I (II/d)	S M K
51.	UDUR MARCELINA SAMOSIR, A.Md. NIP. 19951002 202012 2 007	Pengatur (II/c)	AHLI MADYA
52.	TIRTA HARDIYANTI, A.Md. A.B. NIP. 19971020 202203 2 013	Pengatur (II/c)	AHLI MADYA
53.	MUHAMMAD RONAL DIAS RAMADHAN, A.Md. A.B. NIP. 19980124 202203 1 009	Pengatur (II/c)	AHLI MADYA
54.	ADE RATNA MASFUFAH, A.Md. NIP. 19990106 202203 2 014	Pengatur (II/c)	AHLI MADYA
55.	ABD HAQUL YAQIN NIP. 19860925 201407 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	S M K

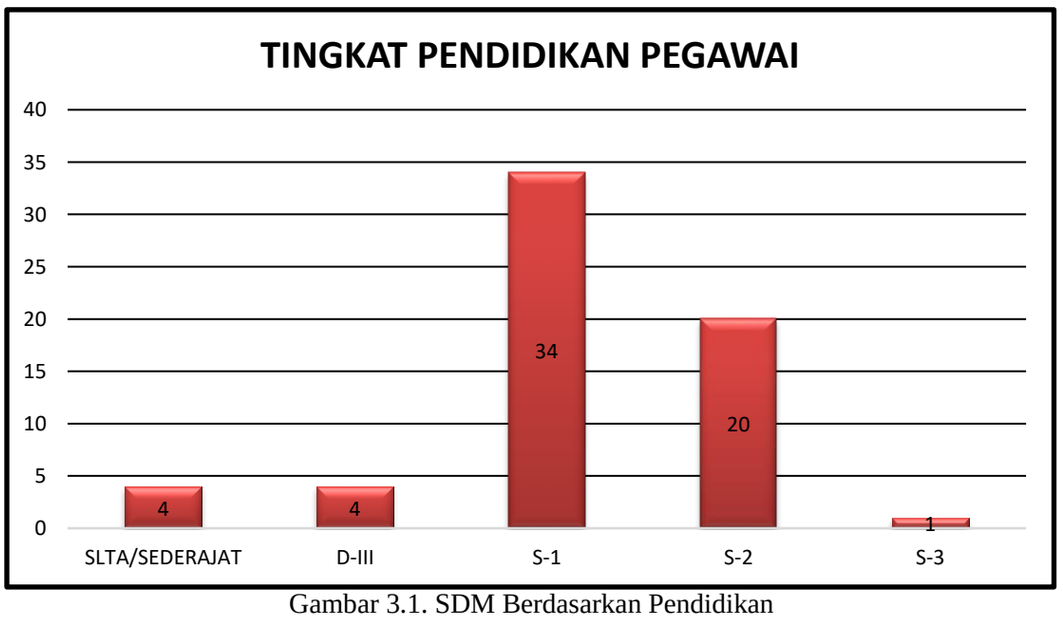
Tabel 3.2. Tabel Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

- Daftar Hakim Adhoc Pengadilan Negeri Kendari sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Drs. PARSUNGKUNAN, S.H. NIP. 19600218 0220220 1 044	Hakim Adhoc Tipikor	Strata 1
2.	MUH. RUTABUZ ZAMAN, S.H., M.H. NIP.19810123 0220220 1 054	Hakim Adhoc Tipikor	Magister
3.	RICO WAN ARMANDO, S.H., M.H. NIP. 19860427 0220180 7 055	Hakim Adhoc PHI	Magister
4.	MAHARDIAN, S.H., M.H. NIP. 19820421 0220180 7041	Hakim Adhoc PHI	Magister
5.	GANDUNG LEDIYANTO, S.P. NIP. 19791128 0220160 2 038	Hakim Adhoc PHI	Strata 1
6.	ARDIAN HAMDANI, S.H., M.H. NIP. 19770125 0220230 2 010	Hakim Adhoc Tipikor	Magister
7.	ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., M.H. NIP.19670807 0220111 0 049	Hakim Adhoc Tipikor	Magister
8.	MUHAMMAD NURJALIL, S.H., M.H. NIP. 73020 2041167 0 002	Hakim Adhoc Tipikor	Magister

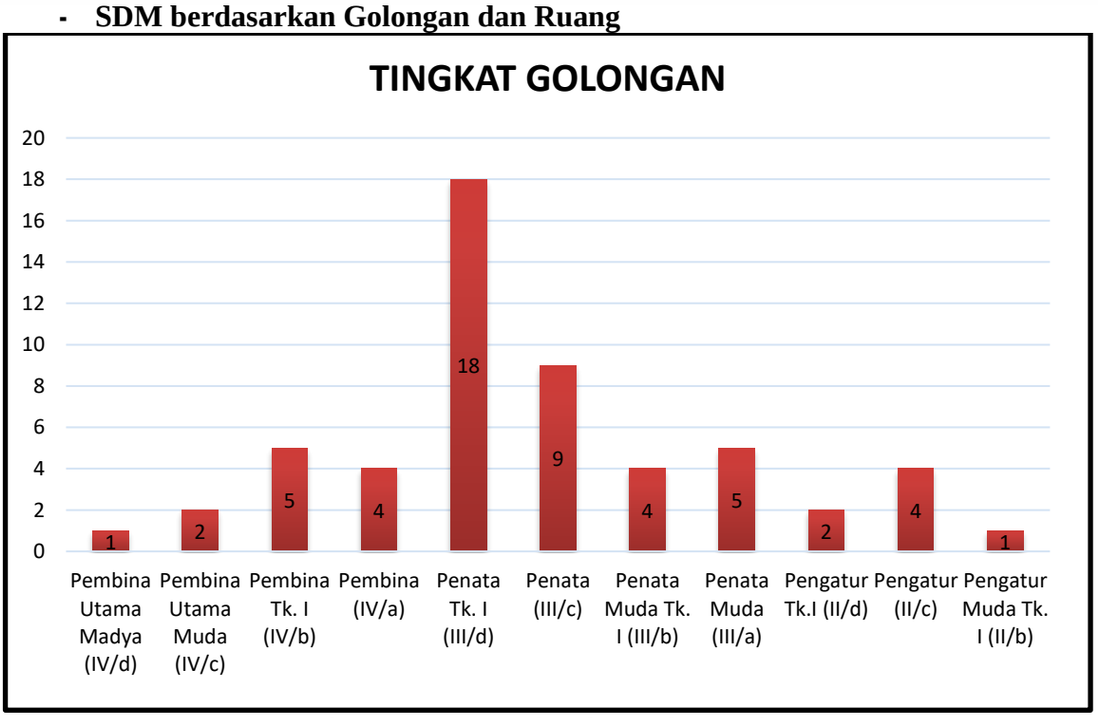
Tabel 3.3. Tabel Nama Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Kendari

- **SDM Berdasarkan Pendidikan**



Gambar 3.1. SDM Berdasarkan Pendidikan

- **SDM berdasarkan Golongan dan Ruang**



Gambar 3.2. SDM Berdasarkan Golongan dan Ruang

B. MUTASI

- **Mutasi Keluar**

Tanggal Mutasi Keluar	Nama/NIP	Satker Asal	Satker Tujuan	SK
21/12/2023	SYARIFUDDIN, S.H. M.Hum. NIP. 19641126 199303 1 001	Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara	Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur	SK Dirjen Badilum MA RI No. 1810/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tgl. 27/11/2023
22/12/2023	NURSINAH, S.H., M.H. NIP. 19730502 200604 2 001	Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara	Pengadilan Negeri Andoolo Klas II Sulawesi Tenggara	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1796/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tgl. 06/11/2023
01/11/2023	NIRMALA HAPSARI, S.Kom. NIP. 19930412 202012 2 010	Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Instansi Pusat	SK Sekretaris MA RI No. 1528/SEK/SK/KP.4.1.3/X/2023 tgl. 06/10/2023
21/12/2023	LA ODE SAMNI, S.H. NIP. 19671231 199003 1 031	Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara	Pengadilan Tinggi Kendari Sulawesi Tenggara	SK Dirjen Badilum MA RI No. 1811/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tgl. 27/11/2023
29/11/2023	HARWANSAH, S.H., M.H. NIP. 19811110 200604 1 005	Pengadilan Negeri Kendari Klas IA	Pengadilan Negeri Belopa Klas II	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 1789/DJU/SK.KP4.1.3/X

		Sulawesi Tenggara	Sulawesi Selatan	/2023 tgl. 24/10/2023
01/12/2023	AHMAD YANI, S.H., M.H. NIP. 19651019 199603 1 00	Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara	Pengadilan Negeri Sragen Klas IA Jawa Tengah	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 1789/DJU/SK.KP4.1.3/X /2023 tgl. 24/10/2023

Tabel 3.4. Daftar Mutasi Keluar

- **Mutasi Masuk**

Tanggal Mutasi Masuk	Nama/NIP	Satker Asal	Satker Tujuan	**SK**
20/12/2023	H. BUDI WINATA, S.H., M.H. NIP. 19730522 199903 1 001	Pengadilan Negeri Kandangan Klas IB Kalimantan Selatan	Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1796/DJU/SK.KP4.1.3/ XI/2023 tgl. 06/11/2023
22/12/2023	ARMIN, S.H., M.H. NIP. 19651231 198903 1 036	Pengadilan Negeri Gorontalo Klas IA Gorontalo	Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara	SK Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1810/DJU/SK.KP4.1.3/ XI/2023 tgl. 27/11/2023
21/12/2023	HANS PRAYUGOTAMA, S.H. NIP. 19860210 20091 2 1 004	Pengadilan Negeri Kuningan Klas II Jawa Barat	Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 1796/DJU/SK.KP4.1.3/ XI/2023 tgl. 06/11/2023
14/12/2023	LA ODE ALAM WUNA KARMAN, S.H. NIP. 19810112 200704 1 001	Pengadilan Negeri Lasusua Klas II Sulawesi Tenggara	Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA.RI. No. 1810/DJU/SK.KP4.1.3/ XI/2023 tgl. 27/11/2023

Tabel 3.5. Daftar Mutasi Masuk

C. PROMOSI

Tanggal Promosi	**Nama/NIP**	**Perubahan Golongan**	**Perubahan Jabatan**	**SK**
29/11/2023	HARWANSAH, S.H., M.H. NIP. 19811110 200604 1 005	-	Dari Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari Klas IA - Sulawesi Tenggara menjadi Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Belopa Klas II - Sulawesi Selatan	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 1789/DJU/SK. KP4.1.3/XI/20 23 tgl. 24/10/2023

22/12/2023	NURSINAH, S.H., M.H. NIP. 19730502 200604 2 001	-	Dari Hakim Pengadilan Negeri Kendari Klas IA Sulawesi Tenggara mejadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Klas II Sulawesi Tenggara	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1796/DJU/SK. KP4.1.3/XI/2023 tgl. 06/11/2023
21/12/2023	LA ODE SAMNI, S.H. NIP. 19671231 199003 1 031	-	Dari Panmud PHI Pengadilan Negeri Kendari Klas IA menjadi Panitera Pengganti Sulawesi Tenggara Pengadilan Tinggi Kendari Sulawesi Tenggara	SK Dirjen Badilum MA RI No. 1811/DJU/SK. KP4.1.3/XI/2023 tgl. 27/11/2023

Tabel 3.6. Daftar Promosi

D. PENSIUN/MENINGGAL DUNIA

- Pensiun

Tanggal Pensiun	Nama/NIP	SK
01/10/2023	SATINAH NIP. 19630920 198903 2 002	SK Ketua Mahkamah Agung RO No. 00517/13001/AZ/08/23 Tgl. 31/08/2023
01/01/2024	WA AIJA, S.H. NIP. 19651231 199003 2 080	SK Ketua Mahkamah Agung RO No. 1789/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 tgl 24/10/2023

Tabel 3.7. Daftar Pensiun

- Meninggal Dunia

Tanggal Pensiun	Nama/NIP	SK
-	-	-

Tabel 3.8 Daftar Meninggal Dunia

E. DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

NO.	NAMA	JABATAN	PELATIHAN/ DIKLAT
1.	NIRMALASARI IDRIS, S.H., M.H NIP. 19890123 200912 2 002	Bendahara Tingkat Pertama	Pelatihan Pejabat Penandatangana Surat Perintah Membayar dan Pelatihan Bendahara Pemasukan
2.	AKIRA HASBULLAH ISAMU, S.E. NIP. 19811118 200904 1 002	Kepala Sub Bagian	Pelatihan e-Learning Kompetensi Manejerial Dan Social Kultural Fungsional Ahli Muda Dan Fungsional Penyelia. Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen. Dan Pelatihan Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan/ APBN/ Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara.
3.	ADE RATNA MASFUFAH, A.Md NIP. 19990106 202203 2 014	Pengelola Barang Milik Negara	Pelatihan Bendahara Pengeluaran
4.	UDUR MARCELINA SAMOSIR, A.Md NIP. 19951002 202012 2 007	Arsiparis Pelaksana	Pelatihan Bendahara Pengeluaran
5.	BUDIMAN, S.E., M.E. NIP. 19810520 201001 1 027	Analis Humas	Pelatihan Bendahara Pengeluaran

Tabel 3.9. Daftar Pegawai yang mengikuti Diklat/Pelatihan

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pengelolaan yang baik dan tepat sasaran. Pengeloaan tersebut dimulai dengan keuangan, sarana presarana, hingga pemanfaatan teknologi informasi.

A. Pengelolaan Keuangan

- **Realisasi Anggaran DIPA :**

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	PROSENTASE (%)
1.	Belanja Pegawai	9.015.885.000	8.990.956.188	24.928.812	99,72%
2.	Belanja Barang	2.619.712.000	2.549.147.329	70.564.671	97,31%
3.	Belanja Modal	61.200.000	61.175.224	24.776	99,96%
	TOTAL	**11.696.797.000**	**11.601.278.741**	**95.518.259**	99,18%

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran DIPA 005.01.2.099659.2023

2. DIPA 03 (Dirjen Badan Peradilan Umum)

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	PROSENTASE (%)
1.	Belanja Barang	264.975.000	249.783.025	15.191.975	94,27%

Tabel 4.2. Realisasi Anggaran DIPA 005.03.2.099660.2023

- **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):**

1. PNBP DIPA 01

NO	DITERIMA	DISETORKAN	PROSENTASE (%)	KET
1.	6.975.500,-	6.975.500,-	100	

Tabel 4.3. PNBP DIPA 005.01.2000.099659

2. PNBP DIPA 03

NO	DITERIMA	DISETORKAN	PROSENTASE (%)	KET
1.	72.635.500,-	72.635.500,-	100	

Tabel 4.4. PNBP DIPA 005.03.2000.099660

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

- **Data Aset Bangunan Gedung**

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pengadilan Negeri Kendari) jalan Mayjen Sutoyo No.37 Kendari Sulawesi Tenggara berdiri diatas tanah seluas 5.262 m2 sesuai dengan Sertifikat No. 084, dengan luas bangunan 1.516 m2.
2. Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pengadilan Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi) Jalan Piere Tendean Baruga Kendari Kecamatan Baruga Kelurahan Watubangga Kota Kendari, berdiri diatas tanah seluas 3.400 m2 sesuai dengan setifikat No.00004 tanggal 09-04-2012, dengan luas bangunan 1080 m2.

Pengadilan Negeri Kendari mempunyai 10 Rumah Dinas terdiri :

1. Rumah Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Sutoyo No. 37 Kendari, berjumlah 1 (satu) unit.
2. Rumah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Balai Kota 1 Kendari, berjumlah 1 (satu) Unit.
3. Rumah Dinas Panitera Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Sutoyo No. 37 Kendari, berjumlah 1 (satu) unit.
4. Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Balai Kota I Kendari , berjumlah 2 (dua) unit.

5. Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Paedai Puncak , berjumlah 2 (dua) unit.
6. Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Saranani, berjumlah 2 (dua) unit, dengan kondisi 1 (satu) unit rusak berat.
7. Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Kendari beralamat di Jalan Balai Kota III Kendari, berjumlah 2 (dua) unit.

- **Data Aset Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)**

No	Jenis /Merk	No Polisi	Pengguna
1	Toyota Innova 2.0 Venturer A/T-TGN140R-MDTHKD22 warna Super White	DT 5 E	Ketua Pengadilan Negeri Kendari
2	Toyota Innova type E DXL M/T warna hitam	DT 1025 E	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari
3	Toyota Innova type Innova GKMRKD warna hitam	DT 7208 E	Operasional PHI/Tipikor
4	Toyota Vios type T.NEW VIOS 1.5 G MT warna hitam	DT 106 E	Sekretaris Pengadilan Negeri Kendari
5	Toyota All New type Avanza G warna merah hati	DT 1031 E	Panitera Pengadilan Negeri Kendari

Tabel 4.5. Data Aset Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)

- **Data Aset Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)**

1. Honda Mega Pro 4 (empat) unit
2. Yamaha 2 (dua) unit
3. Honda Revo 3 (tiga) unit
4. Honda Supra X 1 (satu) unit

- **Ruang Sidang Pengadilan Negeri Kendari :**

►Gedung Pengadilan Negeri Kendari, beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 37 Kendari mempunyai 4 (empat) ruang sidang yaitu :

1. Ruang sidang Cakra
2. Ruang sidang Candra
3. Ruang sidang Sari
4. Ruang sidang Anak

►Gedung Pengadilan Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), beralamat Jl. Piere Tendean, mempuyai 2 (dua) ruang sidang yaitu:

1. Ruang sidang perkara PHI
2. Ruang sidang perkara Tipikor

- **Ruang Kerja**

►Ruang kerja Gedung Pengadilan Negeri Kendari, beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 37 Kendari terdiri dari :

NO	NAMA RUANG KERJA	JUMLAH RUANGAN	KET
1.	Ruang Kerja Ketua	1 (satu) ruangan	-
2.	Ruang Kerja Wakil Ketua	1 (satu) ruangan	-
3.	Ruang Kerja Panitera	1 (satu) ruangan	-
4.	Ruang Kerja Sekretaris	1 (satu) ruangan	-
5.	Ruang Kerja Hakim	4 (empat) ruangan	-
6.	Ruang Kerja Panmud	3 (tiga) ruangan	-
7.	Ruang Kerja Kasub	3 (tiga) ruangan	-
8.	Ruang Kerja Panitera Pengganti	1 (satu) ruangan	-
9.	Ruang Kerja PTSP	1 (satu) ruangan	-
10.	Ruang Kerja Humas	1 (satu) ruangan	-

Tabel 4.6. Data Ruang Kerja

- Ruangan Pendukung

NO	NAMA RUANGAN	JUMLAH RUANGAN	KET
1.	Ruang Command Center	1 (satu) ruangan	-
2	Ruang Server	1 (satu) ruangan	-
3	Ruang Perpustakaan	1 (satu) ruangan	-
4	Ruang Mediasi	1 (satu) ruangan	-
5	Ruang Arsip	2 (dua) ruangan	-
6.	Ruang Bapas/ruang tunggu anak	1 (satu) ruangan	-
7.	Ruang Jaksa	1 (satu) ruangan	-
8.	Ruang Posbakum	1 (satu) ruangan	-
9.	Ruang Pengacara	1 (satu) ruangan	-
10.	Ruang Laktasi	1 (satu) ruangan	-
11.	Ruang Perawatan	1 (satu) ruangan	-

12.	Arena Bermain Anak	Ruang terbuka	
13.	Ruang Tunggu Pengunjung	Ruang terbuka	-
14.	Ruang Tahanan Pria	1 (satu) ruangan	-
15.	Ruang Tahanan wanita	1 (satu) ruangan	-
16.	Ruang Tahanan Anak	1 (satu) ruangan	-
17.	Ruang Piket Jaga Malam	1 (satu) ruangan	-
18.	Toilet Tahanan	2 (dua) unit	-
19.	Toilet Umum Pria dan Wanita	2 (dua) unit	-
20.	Toilet Hakim dan Pegawai	8 (delapan) unit	-
21.	Toilet disabilitas	1 (satu) unit	-

Tabel 4.7. Daftar Ruangan Pendukung

► Ruang Kerja Gedung Pengadilan Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), beralamat Jl. Pierre Tendean, terdiri dari :

NO	NAMA RUANG KERJA	JUMLAH RUANGAN	KET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Ruang Kerja Ketua dan Wakil	1 (satu) ruangan	-
2.	Ruang Kerja Hakim Adhoc Tipikor	1 (satu) ruangan	-
3.	Ruang Kerja Hakim Adhoc PHI	1 (satu) ruangan	-
4.	Ruang Kerja Panmud Tipikor	1 (satu) ruangan	-
5.	Ruang Kerja Panmud PHI	3 (tiga) ruangan	-
6.	Ruang Panitera Pengganti/staf	2 (dua) ruangan	-

Tabel 4.8. Daftar Ruangan Pendukung pada Tipikor

- Ruangan Pendukung

NO	NAMA RUANGAN	JUMLAH RUANGAN	KET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Ruang PTSP	1 (satu) ruangan	-
2.	Ruang Tahanan	1 (satu) ruangan	-
3.	Ruang Arsip	1 (satu) ruangan	-
4.	Ruang Pos Jaga	1 (satu) ruangan	-
5.	Ruang Mushola	1 (satu) ruangan	-

6.	Ruang Tunggu Keluarga Terdakwa	2 (dua) ruangan	-
7	Ruang Tunggu Pengunjung Sidang	Teras depan ruang sidang PHI/Tipikor	-
8.	Toilet	11 (sebelas) unit	-
9.	Gudang	1 (satu) ruangan	-

Tabel 4.9. Daftar Ruangan Pendukung

- **Komputer Dan Internet**
  - Jumlah Laptop 22 Unit (aktif)
  - Jumlah PC 58 Unit (aktif)
  - Internet Pengadilan Negeri Kendari menggunakan Jaringan Astinet 15 Mbps dan Indihome 30Mbps sebanyak 3 jaringan dengan total 90 Mbps
  - Internet Pengadilan Negeri Kendari untuk Gedung PHI dan Tipikor menggunakan Jaringan Astinet 10 Mbps dan Indihome 30 Mbps.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Sarana dan Prasarana IT

1. Perangkat Lunak (Software)
   (a) Website Pengadilan Negeri Kendari www.pn-kendari.go.id memberikan informasi tentang profil, laporan, berita, informasi perkara, pengumunan dan kegiatan pada Pengadilan Negeri Kendari.
   (b) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / *Case Tracking System* (CTS) http://sipp.pn-kendari.go.id memberikan informasi tahapan perkara mulai dari pendaftran sampai pada putusan yang telah dimutakhirkan setiap harinya, baik untuk pihak internal Pengadilan maupun pihak eksternal Pengadilan.
   (c) Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Badilum MA RI http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/#eis merupakan Aplikasi berbasis Web yang digunakan oleh Dirjen Badum MA RI dalam memonitoring dan mengevaluasi pelasanaan Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) terhadap Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.

(d) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ merupakan aplikasi berbasis web untuk mengupload perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK pada tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap.

(e) Komdanas (Komunikasi Data Nasional) www.komdanas.mahkamahagung.go.id merupakan aplikasi yang digunakan untuk laporan keuangan, kepegawaian dan perencanaan.

(f) Sistem Informasi Kepegawaian https://sikep,mahkamahagung.go.id/ aplikasi yang digunakan untuk *update* data pegawai pada Pengadilan Negeri Kendari dan usul kenaikan pangkat otomatis (KPO).

(g) E-Kinerja https://kinerja.bkn.go.id/login merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja ASN berbasis web yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit/satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja.

(h) E-Court Mahkamah Agung RI https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online (e-Filling), mendapatkan taksiran dan pembayaran panjar biaya perkara secara online (e-Payment), pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summons) dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Litigation).

(i) Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/ merupakan Integrasi berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

(j) Pelaporan Administarsi Peradilan Umum MA RI https://pelaporan.badilummahkamahagung.go.id merupakan Layanan Aplikasi Pelaporan Online bagi pengguna untuk melakukan pelaporan mandiri kepada Dirjen Badilum.

(k) Aplikasi Eraterang https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/ merupakan Layanan Permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon secara online.

(l) Aplikasi Survey Badilum Mahkamah Agung RI (SI SUPER) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ aplikasi yang digunakan untuk memonitoring dan menghitung Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK).

(m) Aplikasi Online Pendukung Lainnya

- www.sirup.lkpp.go.id
- www.djponline.pajak.go.id
- www.sse2.pajak.go.id
- www.spaint.kemenkeu.go.id
- www.simponi.kemenkeu.go.id
- www.simari.mahkamahagung.go.id
- www.sakti.kemenkeu.go.id
- www.satudja.kemenkeu.go.id
- https://esr.menpan.go.id/
- www.e-rekon-lk-djpbn.kemenkeu.go.id
- www.monev.kemenkeu.go.id
- www.bappenas.go.id
- https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/seMAr/auth
- https://eiplans.mahkamahagung.go.id.
- https://sso.mahkamahagung.go.id.

(n) Aplikasi Online yang terdapat pada server Lokal PN Kendari

1. PTSP+
2. SIPP
3. MIS
4. LLK Simari
5. E-Court
6. E-Simpel
7. E-Cepat
8. E-Pakta
9. E-Paduka
10. E-Brosur
11. E-Posbakum
12. E-Panjar
13. E-Learning
14. V-LARI
15. Antrian PTSP

(o) Aplikasi Online yang menggunakan server di luar PN Kendari :

1. Si-Asikk
2. Aplikasi *Userway* Disabilitas

(p) Aplikasi *Offline* Pendukung lainnya

1. GPP/Gaji
2. SAS/ Bendahara Pengeluaran
3. RKAKL
4. E-SPT
5. PIN PPSPM
6. SAIBA Satker 01 dan 03
7. SPT pph masa 22
8. SPT pph masa 23
9. SPT PPN 1107 PUT
10. Psedia
11. BMNKPB
12. Siman
13. SimakBMN

2. Perangkat Keras (*Hardware*)

No	Uraian Aset	Jumlah	Keterangan
1	CCTV	29	-
2	LCD / Projector / Infocus	4	2 Rusak Berat
3	Focusing Screen / Layar LCD Projector	2	-
4	Televisi	9	1 Rusak Berat 2 Unit di Kantor PN Tipikor Baruga
5	UPS	7	1 Unit di Kantor PN Tipikor Baruga
6	Personal Computer	58	Total keseluruhan PC aktif yang ada di Kantor PN Tipikor Baruga dan Kantor PN Kdi Tipulu
7	Laptop	25	3 Rusak Ringan
8	Printer	58	Aktif
9	Scanner	5	-
10	Server	2	-
11	Router (Mikrotik)	2	- 1 Unit di Kantor PN Tipikor Baruga
12	Modem	0	-
13	Switch Hub	11	- 3 Unit di Kantor PN Tipikor Baruga

Tabel 4.10. Daftar Perangkat Keras (*Hardware*)

- **Implementasi *E-court* di Lingkungan Peradilan Umum**

E-Court atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018, pengguna yang dapat beracara menggunakan *e-Court* hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari keluarnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-Court* dengan menambahkan menu *e-litigation* (persidangan secara elektronik).

Implementasi pelaksanaan *e-Court* pada Pengadilan Negeri Kendari tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran perkara Gugatan sebanyak 146 perkara dengan rincian sebagai berikut:
   - Perkara Gugatan terdaftar dan teregistrasi sebanyak 146 perkara
   - Perkara Gugatan tidak teregistrasi sebanyak 0 perkara
   - Perkara Gugatan sudah putus sebanyak 29 perkara
   - Perkara Gugatan di Cabut sebanyak 76 perkara
   - Perkara Gugatan dalam proses persidangan sebanyak 42 perkara
2. Perkara Gugatan Sederhana sebanyak 10 perkara dengan rincian sebagai berikut :
   - Perkara Gugatan Sederhana terdaftar dan teregistrasi sebanyak 10 perkara
   - Perkara Gugatan Sederhana tidak teregistrasi sebanyak 0 perkara

- Perkara Gugatan Sederhana di cabut sebanyak 1 perkara
- Perkara Gugatan Sederhana sudah putus sebanyak 9 perkara
- Perkara Gugatan Sederhana dalam proses persidangan sebanyak 0 perkara

3. Perkara Perlawanan/Bantahan sebanyak 2 perkara dengan rincian sebagai berikut :
   - Perkara Bantahan terdaftar dan teregistrasi sebanyak 2 perkara
   - Perkara Bantahan tidak teregistrasi sebanyak 0 perkara
   - Perkara Bantahan di cabut sebanyak 1 perkara
   - Perkara Bantahan sudah putus sebanyak 0 perkara
   - Perkara Bantahan dalam proses persidangan sebanyak 0 perkara

4. Perkara Permohonan sebanyak 194 perkara dengan rincian sebagai berikut :
   - Perkara permohonan terdaftar dan teregistrasi 194 perkara
   - Perkara permohonan tidak teregistrasi 0 perkara
   - Perkara permohonan di cabut 25 perkara
   - Perkara permohonan sudah putus sebanyak 169 perkara
   - Perkara permohonan dalam proses persidangan sebanyak 0 perkara

5. Perkara Permohonan Konsinyasi sebanyak 0 perkara dengan rincian sebagai berikut :
   - Perkara permohonan konsinyasi terdaftar dan teregistrasi 0 perkara
   - Perkara permohonan konsinyasi tidak teregistrasi 0 perkara
   - Perkara permohonan konsinyasi di cabut 0 perkara
   - Perkara permohonan konsinyasi sudah putus sebanyak 9 perkara
   - Perkara permohonan konsinyasi dalam proses persidangan sebanyak 9 perkara

6. Perkara PHI sebanyak 23 perkara dengan rincian sebagai berikut :
   - Perkara PHI terdaftar dan teregistrasi 23 perkara
   - Perkara PHI tidak teregistrasi 0 perkara
   - Perkara PHI di cabut 2 perkara
   - Perkara PHI sudah putus sebanyak 22 perkara
   - Perkara permohonan konsinyasi dalam proses persidangan sebanyak 1 perkara

- **Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum**

SIPP adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara pengadilan tingkat pertama. layanan informasi berbasis teknologi ini di dalamnya terdapat pencatatan informasi yang sangat lengkap diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara, Biaya Perkara Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik secara gratis/cuma-cuma dan realtime.

Pada hakikatnya Pengadilan Negeri Kendari telah mengimplementasikan pengisian SIPP sejak dari diterimanya berkas perkara sampai pada tahapan akhir yakni minutasi perkara. Proses penyelesaian perkara yang tercatat di dalam SIPP juga tercatat dalam register manual sehingga adanya kesamaan data yang terdapat dalam buku register dan aplikasi SIPP.

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kendari telah menyelesaikan perkara sebanyak 1081 perkara minutasi, Perkara Masuk Tahun 2023 sebanyak 1057, Sisa Perkara tahun Lalu sebanyak 193 perkara dan Sisa tahun ini sebanyak 169 perkara dengan Rasio Penyelesaian Perkara sebesar 86,48 %.

Berdasarkan klasifikasi dan beban perkara Pengadilan Negeri Kendari masuk dengan kategori jumlah perkara sebanyak 1001 s/d 2000. Berikut capaian Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kendari Tahun 2023 beserta peringkat yang diperoleh :

Capaian Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kendari Tahun 2023

NO	Periode	Kinerja	Kepatuhan	Kelengkapan	Kesesuaian	Total	Peringkat Nasional
1	Januari	104,07	539,14	120,76	168,99	932,96	**3**
2	Februari	119,66	532,17	109,00	166,55	927,38	11
3	Maret	128,64	535,94	121,00	166,19	951.77	**4**
4	April	131,78	527,99	97,00	163,63	920,40	**10**
5	Mei	133,72	514,19	108,35	165,45	921,71	15
6	Juni	137,17	515,34	121,00	166,57	940,08	**8**
7	Juli	143,23	523,44	108,80	155,58	931,05	13
8	Agustus	146,72	525,00	96,79	168,10	936,61	14

9	September	147,98	530,50	96,54	159,97	934,99	11
10	Oktober	150,35	524,82	121,00	167,33	963,50	**6**
11	November	149,61	508,10	108,82	167,12	933,65	13
12	Desember	150,18	522,45	105,18	165,16	942,97	**9**

Tab 4.11. Daftar Capaian SIPP PN Kendari Tahun 2023

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan publik senantiasi dievaluasi sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Evaluasi tersebut juga menghadirkan berbagai inovasi yang memudahkan pelasanaan tugas, baik untuk internal maupun eksternal.

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Umum Dalam Memberikan Pelayanan informasi kepada pencari keadilan.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia *Court Performance Excellent*–ICPE).

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu :

1) Kepemimpinan (*leadership*);
2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*);
3) Fokus Pelanggan (*customer focus*);
4) Sistem Dokumentasi (*document system*);
5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*);
6) Manajemen Proses (*process management*); dan
7) Hasil Kinerja (*performance results*).

Pada tahun 2019-2022, Pengadilan Negeri Kendari telah memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Kendari dari Badan Peradilan Umum. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Umum Nomo 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022 tanggal 09 Desember 2022 Pengadilan Negeri Kendari memperoleh Nilai Akreditasi yaitu pada Tahun 2021 sebesar 716 dan Tahun 2022 sebesar 720 dengan predikat Nilai "**A *Excellent***".

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Kendari menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara,

hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga indepedensi dan imparsialitas aparatur Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia. Pengadilan Negeri Kendari telah memiliki kebijakan Standar Pelayanan yang mendasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 kemudian dirubah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Kendari.

Oleh karenanya untuk menyikapi hal tersebut, Pengadilan Negeri Kendari terlah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan yaitu dengan membuat tim supervisi dan petugas pelayanan PTSP dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendari W23-U1/86/OT.01.3/1/2023 tentang Tim Supervisi Pelayanan PTSP pada Pengadilan Negeri Kendari dan SK Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor W23-U1/131/OT.01.3/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Struktur dan bentuk pelayanan oleh Petugas Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kendari. Layanan PTSP yang tersedia pada Pengadilan Negeri Kendari yaitu Layanan Umum, Pidana, Perdata, Hukum, Pojok E-Court, Informasi dan Pengaduan dan Layanan Ruang tamu Terbuka Online.

Sejak di berlakukannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Kendari terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana. Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Kendari mendapatkan penghargaan nominasi finalis dan harapan III pada Lomba PTSP kategori PN Kelas IA.



Gambar 5.1. Piagam Penghargaan Nominasi Finalis dan Harapan III Lomba PTSP

C. Inovasi Pelayanan Publik

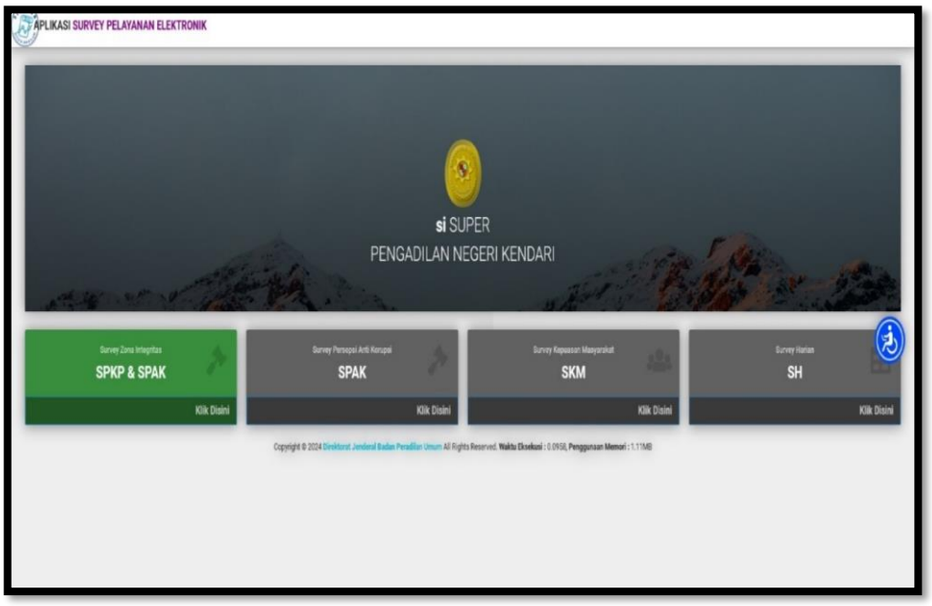
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem tatanegara Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman, selaras dengan misi keempatnya yakni meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan dapat terlihat dengan hadirnya inovasi pelayanan publik berupa *E-litigasi* yang secara resmi diluncurkan pada 19 Agustus 2019, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019.

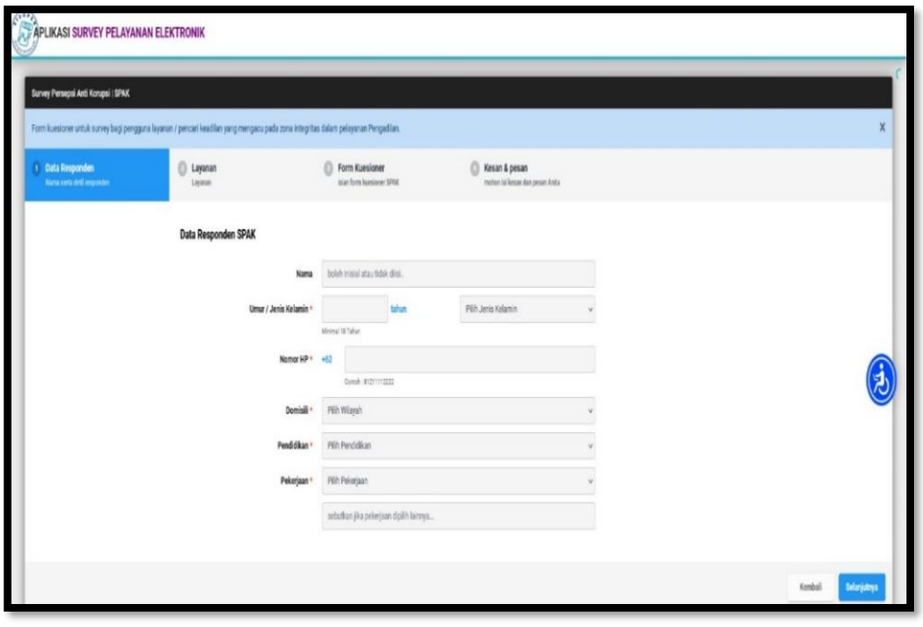
E-Litigasi merupakan kelanjutan dari *E-Court* sejak 2018 lalu untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara dengan Perma No 1 /2019 merupakan perubahan dari Perma 3 /2018 mengenai *E-Court*. *E-Litigasi* merupakan inovasi lebih meluas dari sistem *E-Court*, yangmana *E-Court* melakukan administrasi pelayanan Publik pengadilan seperti pendaftaran gugatan, pembayaran perkara, notifikasi secara online serta Pemanggilan (Relas Panggilan) secara online. Sedangkan *E-Litigasi* dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan.

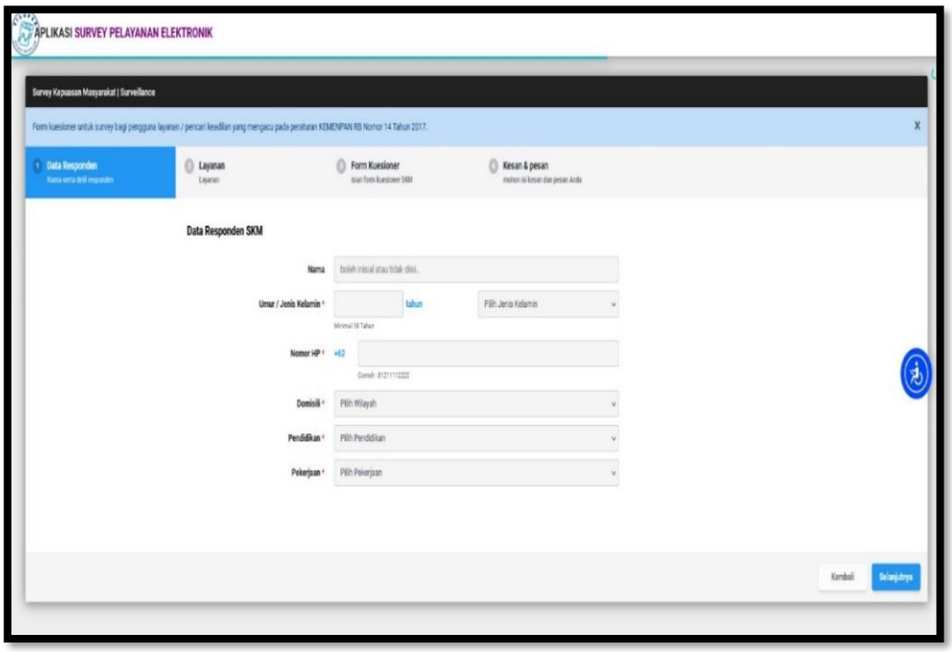
Dalam rangka mendukung program Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Negeri berusaha menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik guna memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Adapun inovasi-inovasi yang terus di kembangkan oleh Pengadilan Negeri Kendari adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Media Sosial berupa *Whatsapp Groups* dalam menunjang kinerja aparatur pengadilan untuk memudahkan dan meminimalisir atau mengurangi kontak fisik antara pihak kejaksaan dan panitera pengganti maupun majelis hakim ketika akan melakukan persidangan.
2. Adanya aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat yang di pasang pada ruang PTSP sehingga para pengguna layanan pengadilan dapat langsung memberi tanggapan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh petugas PTSP.

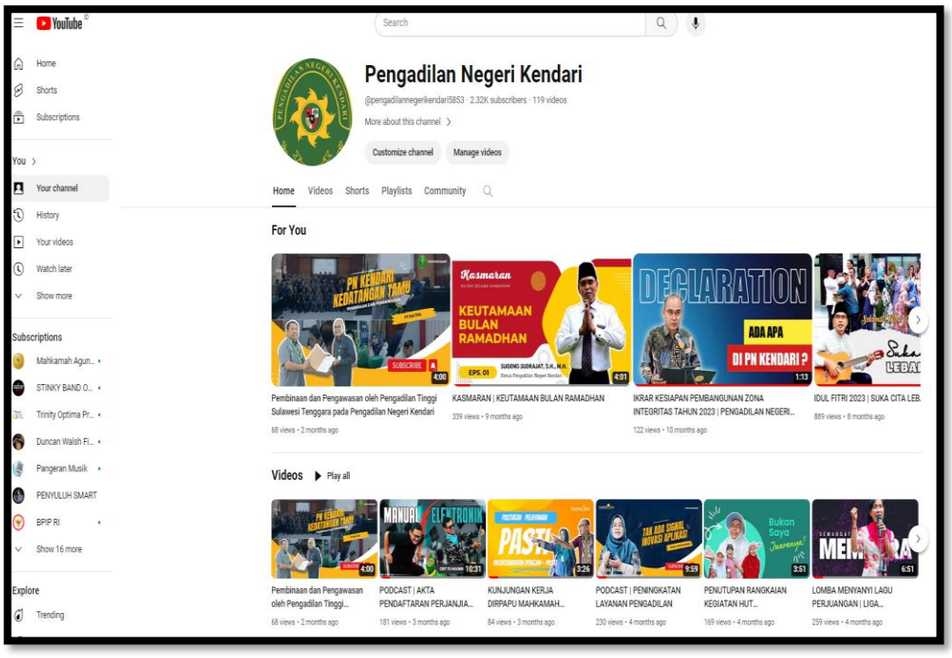


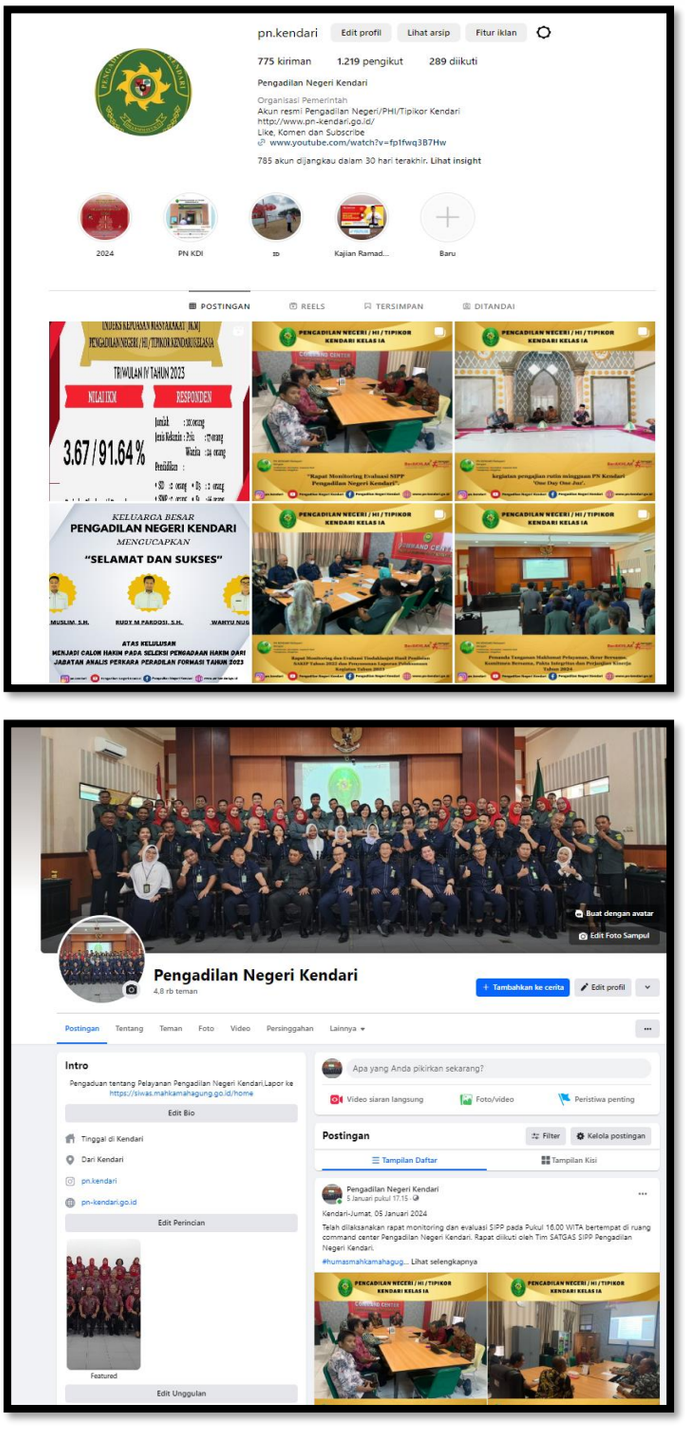




Gambar 5.2. Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat

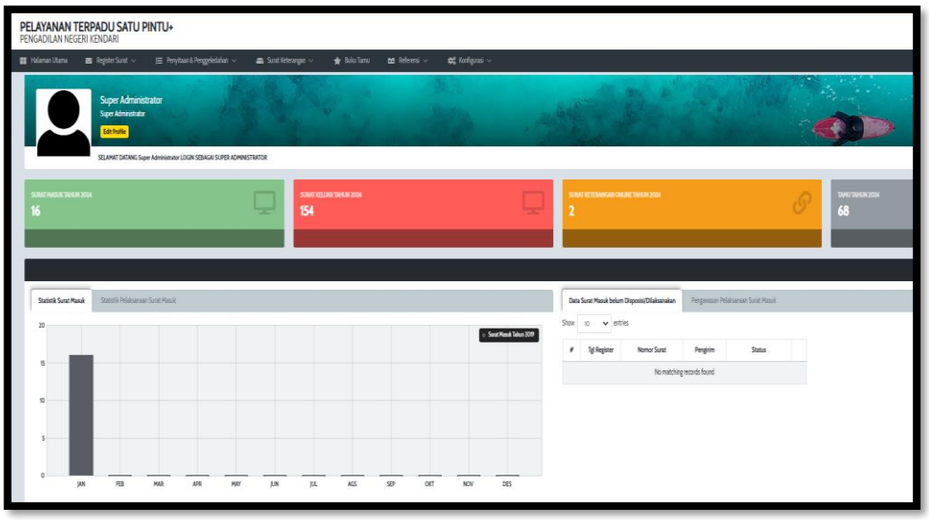
3. Pemanfaatan Media Sosial Youtube, Facebook dan Instagram dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Kendari khususnya terkait kegiatan dan Informasi Pelanggaran Lalu Lintas atau Tilang dan Biaya Proses.





Gambar 5.3. Youtube, Facebook dan Instagram

4. Penggunaan Aplikasi PTSP dalam menerima dan memberikan produk layanan.



Gambar 5.4. Aplikasi PTSP

5. Tersedianya Layar Monitor dalam menampilkan informasi-informasi Profil Pengadilan, Indeks Kepuasan Masyarakat, Biaya Proses Perkara dan beberapa Animasi permohonan Surat Keterangan (Suket) melalui PTSP dan *E-Court*.





Gambar 5.5. Layar Monitor Informasi

6. Tersedianya LCD Monitor yang menampilkan jadwal persidangan yang terhubung langsung dengan SIPP.



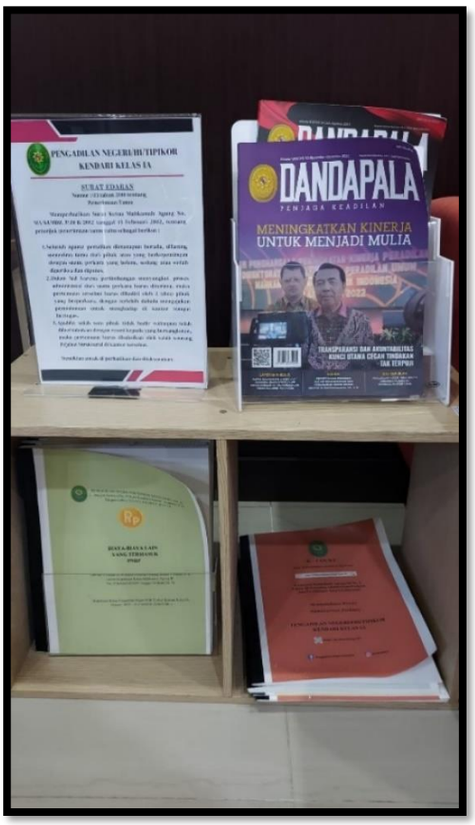
Gambar 5.6. LCD Monitor Terhubung dengan SIPP

7. Tersedianya Pojok *E-court* pengadaan Mahkamah Agung RI yang di letakkan ruang PTSP.



Gambar 5.7. Pojok *E-Court*

8. Adanya leaflet dan buku saku yang disediakan di Meja PTSP untuk memudahkan para pengguna layanan mengetahui tata cara melakukan pendaftaran perkara secara elektronik (*e -court*).



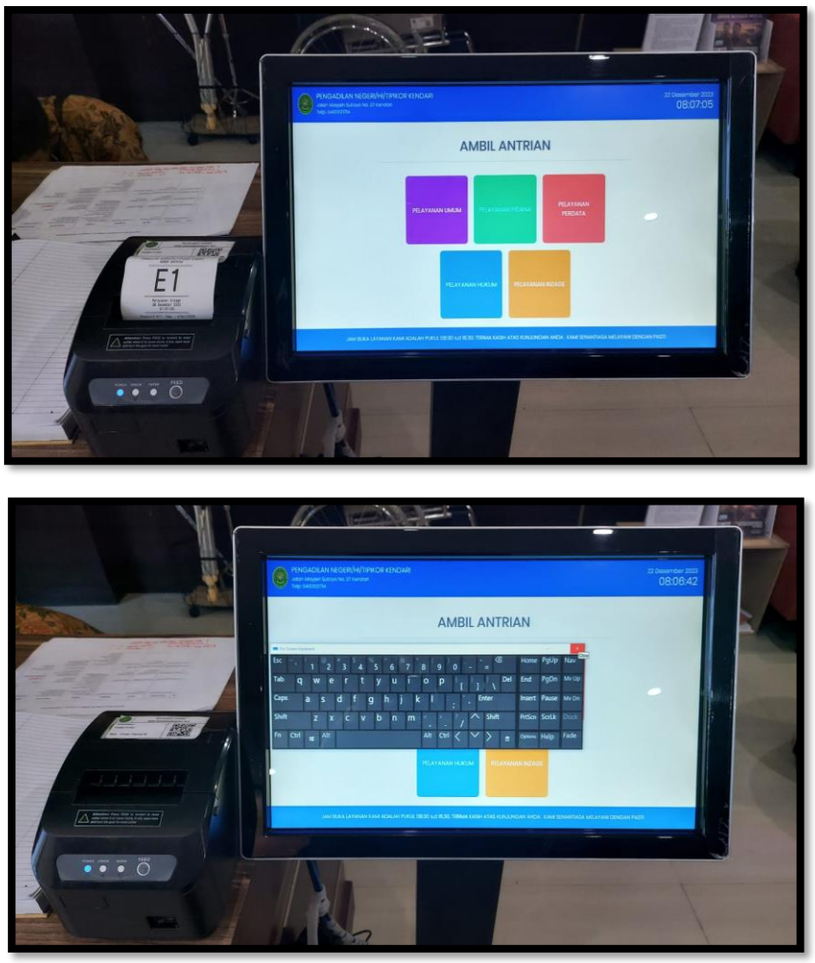
Gambar 5.8. Leaflet Informasi Layanan

9. Bekerjasama dengan BRI dalam menyediakan Mesin EDC untuk memudahkan para pengguna melakukan transaksi pembayaran panjar biaya perkara.



Gambar 5.9. EDC BRI

10. Tersedianya mesin antrian pelayanan PTSP untuk memudahkan pemberian pelayanan kepada pengunjung agar lebih tertib dan rapi.



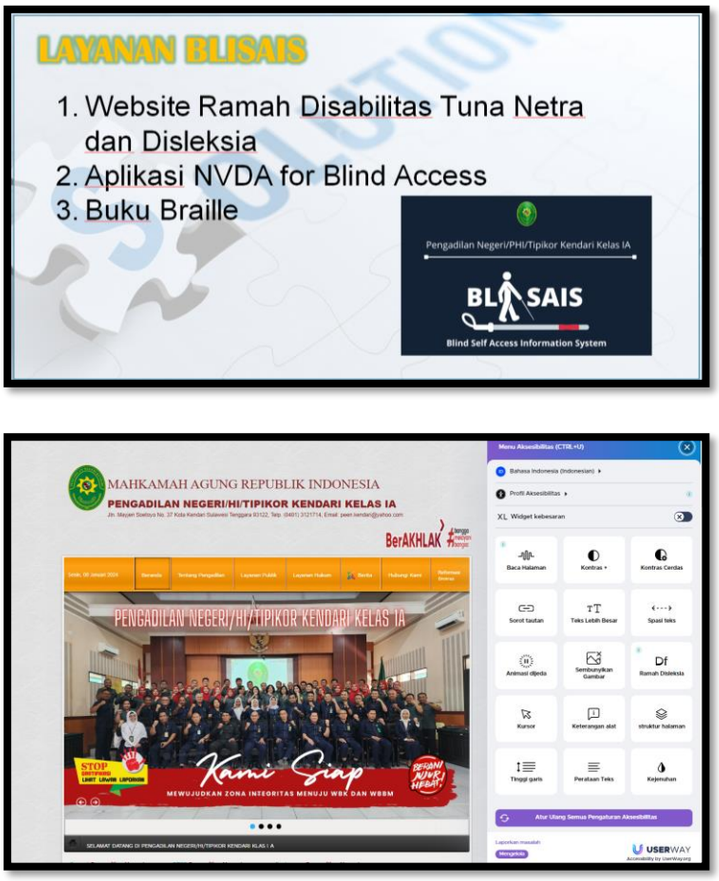
Gambar 5.10. Antrian Pelayanan PTSP

11. Tersedianya layanan bagi disabilitas (Buku Braille 6 jenis tentang layanan yang ada di Pengadilan)



Gambar 5.11. Layanan Buku Braille

12. Tersedianya Website bagi Pengguna Penyandang Disabilitas Tuna Netra dan Disleksia.



Gambar 5.12. Website Layanan Disabilitas

13. Pemberian kompensasi bagi pengguna layanan yang melebihi jam layanan

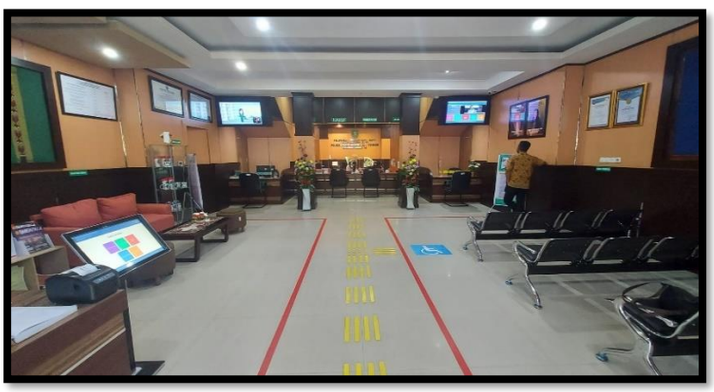


Gambar 5.13. Kompensasi Untuk Pengguna Layanan

14. Sarana dan Prasarana Bagi Disabilitas



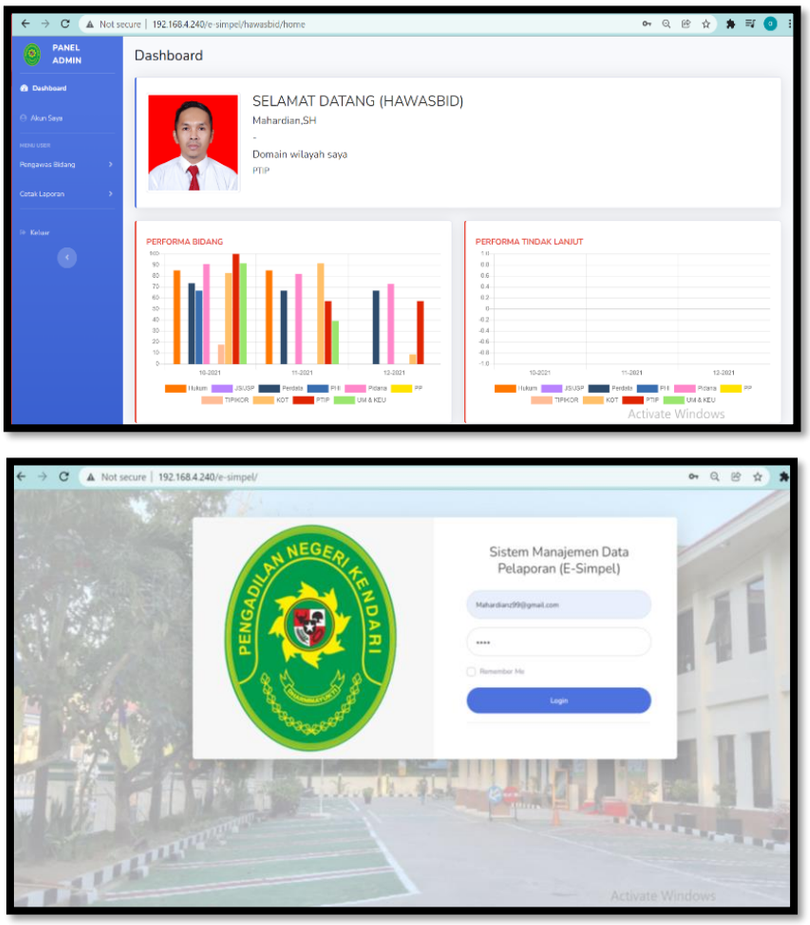






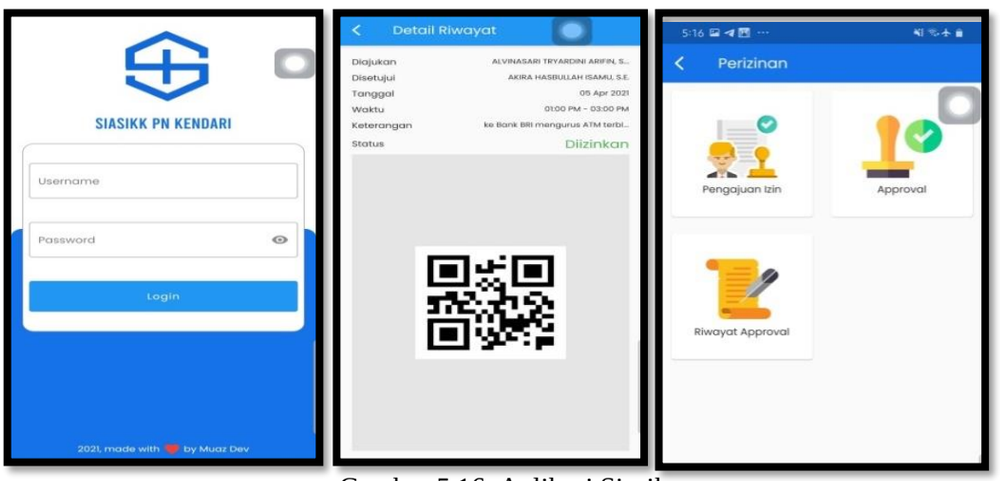
Gambar 5.14. Sarana dan Prasarna Disabilitas

15. Aplikasi Sistem Manajemen Data Pengawasan (E-Simpel)



Gambar 5.15. Aplikasi E-Simpel

16. Aplikasi Sistem Aplikasi Surat Izin Keluar Kantor (Siasik)



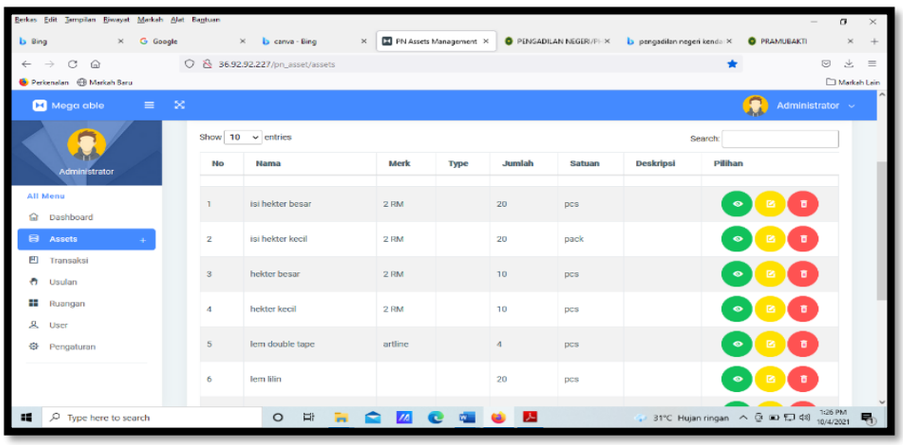
Gambar 5.16. Aplikasi Siasik

17. Si Ulandari (Seputar Ulasan Pengadilan Negeri Kendari)



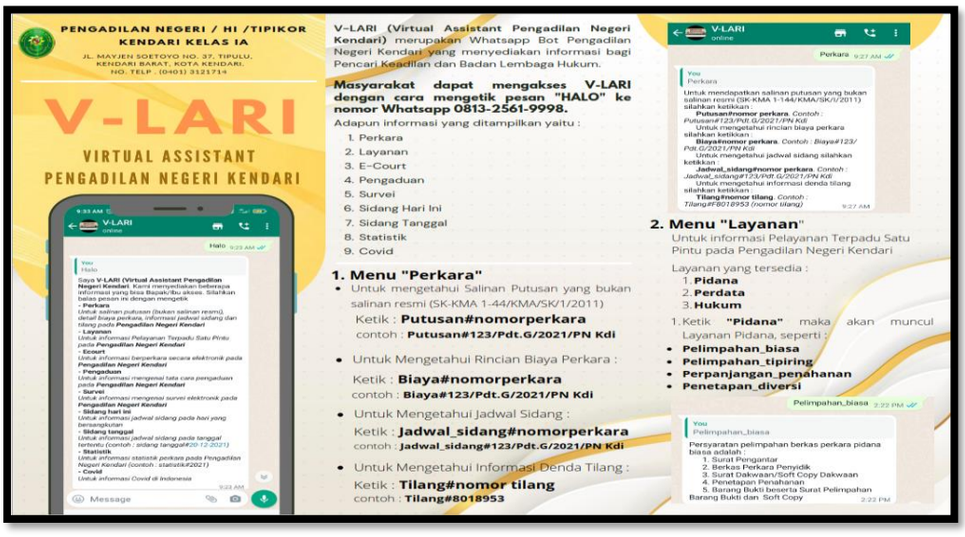
Gambar 5.17. Si Ulandari

18. Aplikasi E- Cepat (Checklist Permintaan ATK)



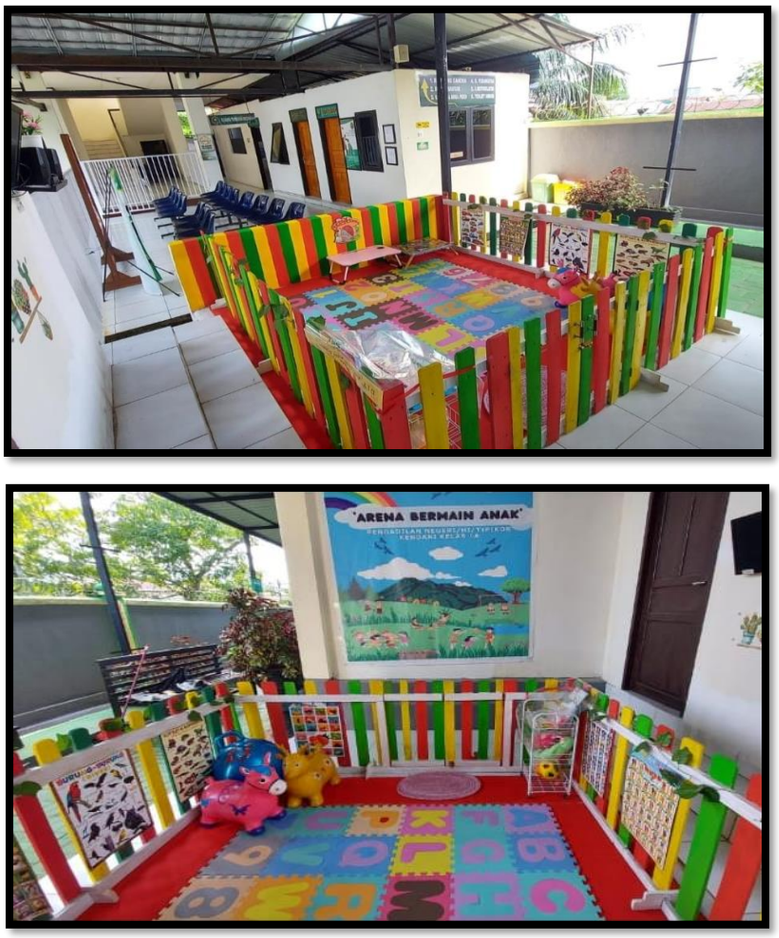
Gambar 5.18. Aplikasi E-Cepat

19. Aplikasi V-LARI (Virtual Assistant Pengadilan Negeri Kendari) merupakan *Whatsapp Bot* Pengadilan Negeri Kendari yang menyediakan informasi bagi Pencari Keadilan dan Badan Lembaga Hukum.



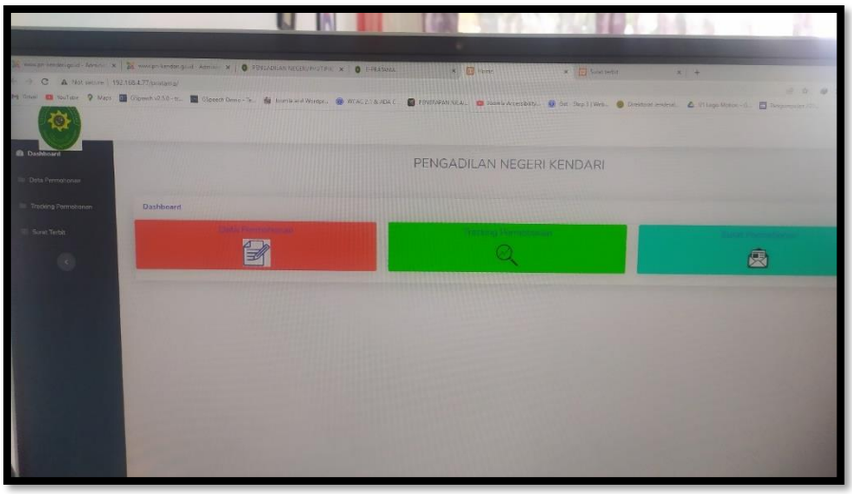
Gambar 5.19. Aplikasi V-LARI

20. Arena Bermain Anak sebagai sarana edukasi dalam upaya peningkatan pelayanan Bagi Kelompok Rentan di Pengadilan Negeri Kendari.



Gambar 5.20. Arena Bermain PN Kendari

21. Aplikasi E-PAKTA, merupakan Aplikasi untuk mengunggah syarat-syarat permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) secara online.



Gambar 5.21. Aplikasi E-Pakta

22. Aplikasi E-Paduka, merupakan fitur tambahan di *Whatsapp Bot V-LARI* berupa Pelayanan Disabilitas dengan Peminjaman Alat Bantu di Pengadilan Negeri Kendari



Gambar 5.22. Aplikasi E-Paduka

23. Ruang Perawatan Dalam Peningkatan Pelayanan Bagi Kelompok Rentan di Pengadilan Negeri Kendari.



Gambar 5.23. Ruang Perawatan

24. Ruang Laktasi di Pengadilan Negeri Kendari dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan terhadap kaum rentan khususnya ibu menyusui di Pengadilan Negeri Kendari.



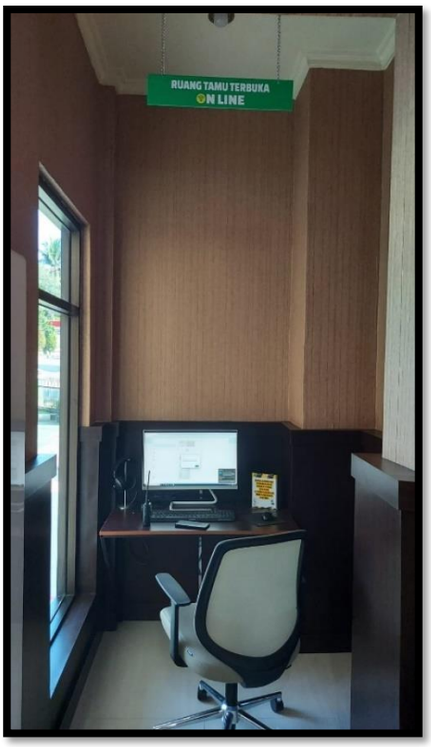
Gambar 5.24. Ruang Laktasi

25. Ruang *Broadcast* Pengadilan Negeri Kendari yang berfungsi sebagai media penyiaran informasi baik seputar Pengadilan maupun di luar Pengadilan yang ditujukan untuk khalayak public dan ditayangkan melalui kanal Youtube Pengadilan Negeri Kendari.



Gambar 5.25. Ruang *Broadcast*

26. Ruang Terbuka Tamu Online merupakan pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan yang ingin menemui pimpinan yang terhubung melalui *video call* melalui komputer yang sudah terhubung oleh sistem sehingga meminimalisir bertemu secara langsung dan segala percakapan akan terekam otomatis oleh sistem.



Gambar 5.26. Ruang Terbuka Tamu Online

BAB VI PENGAWASAN

Pengawasan penting untuk dilakukan sebagai salah satu bentuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tanggungjawab pelasanaan tugas.

A. Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Rutin/Reguler, yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara prefentif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisian sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor W23-U1/116/PS.03/1/2023 tanggal 02 Janauri 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, berikut daftarnya :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. NIP. 197907082002121004	Hakim Madya Pratama	Kepaniteraan Pidana
2	Mahardian, S.H. NIP. 1982042102201807041	Hakim Ad Hoc PHI	
3	Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H. 196611161992121001	Hakim Madya Pratama	Kepaniteraan Perdata
4	Sera Achmad, S.H., M.H. NIP. 19791025 200502 2 001	Hakim Madya Pratama	
5	Andi Eddy Viyata, S.H. NIP. 19751130 200112 1 003	Hakim Madya Pratama	Kepaniteraan Hukum
6	Ardian Hamdani, S.H., M.H. NIP. 1977012502202302010	Hakim Ad Hoc Tipikor	
7	Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. NIP. 19790708 200212 1 004	Hakim Madya Pratama	Kepaniteraan Tipikor
8	Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H. NIP. 1981012302202201054	Hakim Ad Hoc Tipikor	
9	Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H. NIP. 19741120 199003 1 004	Hakim Madya Muda	Kepaniteraan Hubungan Industrial
10	Rico Wan Armando, S.H. NIP. 1986042702201807055	Hakim Ad Hoc PHI	
11	Ahmad Yani, S.H., M.H. NIP. 19651019 199603 1 002	Hakim Madya Utama	Sub Bagian Umum Dan Keuangan
12	Nursinah, S.H., M.H. NIP. 19730502 200604 2 001	Hakim Pratama Utama	
13	Wahyu Bintoro, S.H. NIP. 19760823 200212 1 002	Hakim Madya Pratama	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Tata Laksana
14	Gandung Lediyanto, S.P NIP. 1979112802201602038	Hakim Ad Hoc PHI	

15	Harwansah, S.H., M.H. NIP. 19811110 200604 1 005	Hakim Pratama Utama	Sub Bagian Perencanaan, Ti Dan Pelaporan
16	Drs. Parsungkunan, S.H. NIP. 1960021802202201044	Hakim Ad Hoc Tipikor	

Tabel 6.1. Data Hakim Pengawas Bidang

Pengawasan Melekat yang telah diterapkan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Kendari antara lain :

a. Pelaksanaan rapat berjenjang setiap bulan yang dilaksanakan oleh setiap Bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dalam rangka penilaian kinerja.
b. Pelaksanaan rapat pengawasan bidang yang dilaksanakan setelah rapat berjenjang pada setiap bagian, dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan bidang mendapatkan informasi permasalahan yang dihadapi, pemecahan masalah serta pelaksanaan tugas yang telah selesai dilaksanakan yang dituangkan dalam bentuk laporan pengawasan bidang dan dipertanggungjawabkan setiap bulannya.
c. Pelaksanaan rapat dinas adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan pengadilan yang rutin dilaksanakan di minggu pertama pada bulan berjalan untuk membahas seluruh permasalahan yang telah dilaporkan oleh pengawas bidang serta mencari solusi secara bersama-sama dari permasalahan tersebut.
d. Pelaksanaan rapat Baperjakat, yang diperuntukan bagi pegawai telah memenuhi persyaratan untuk dipromosi maupun pegawai yang bermohon untuk mutasi.
e. Pelaksanaan rapat yang bersifat insidentil, dilaksanakan tanpa direncanakan oleh pimpinan apabila ada hal-hal yang harus diselesaikan dalam waktu singkat.
f. Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu.
g. Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Hakim & Hawasbid, Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dilaksanakan setiap bulan dan dilakukan langsung oleh Pimpinan yaitu Ketua Pengadilan Negeri Kendari.

2. Pengawasan Rutin/Reguler pada Pengadilan Negeri Kendari antara lain :

a. Pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

b. Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebanyak 2 kali yaitu pada bulan April dan Oktober 2023 dan telah ditindaklanjuti.

c. Pada Tahun 2023 Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum telah melakukan pengawasan sebanyak satu kali pada Bulan April 2023 dan telah ditindaklanjuti.

B. Evaluasi

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya diperlukan evaluasi sebagai tindaklanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan. Evaluasi kinerja sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi karena dengan evaluasi kinerja dapat meningkatkan perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas serta terukur pada masing-masing unit kerja. Berikut hasil evaluasi Pengadilan Negeri Kendari selama Tahun 2023 :

1. Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta tindaklanjut terhadap hasil pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan reguler oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dam Dirjen Badilum
2. Dalam pelaksanaan persidangan baik perkara pidana maupun perdata dilakukan secara langsung.
3. Peningkatan penyelesaian perkara dengan Nilai Evaluasi Implementasi SIPP tertinggi dengan ranking 10 besar pada tahun 2023 untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas IA dengan jumlah perkara sebanyak 10001 s/d 2000 sebanyak selama 6 kali dalam satu tahun.
4. Pengadilan Negeri Kendari juga menerapkan sistem pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Hakim, karyawan/i dan tenaga honorer yang memiliki kinerja terbaik setiap bulan dan diumumkan dalam rapat bulanan yang diadakan setiap bulan pada minggu pertama, sedangkan

pemberian *punishment* terhadap pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja dengan memberikan surat teguran atau peringatan.

5. Terhadap unsur layanan terendah atas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Kendari yang terdiri dari 3 unsur (1) Unsur prosedur layanan, (2) Unsur waktu pelayanan dan (3) Unsur produk layanan. Pengadilan Negeri Kendari telah menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi dengan Tim Supervisi dan petugas PTSP.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama tahun 2023 Pengadilan Negeri Kendari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada, berikut capaian-capaian yang telah dilakukan yaitu :

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik.
- Rasio tingkat penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Kendari mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 82,30% naik menjadi 86,48%.
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Negeri Kendari berjumlah 63 orang, yang terdiri dari 10 Orang Hakim Karir, 8 Orang Hakim Ad Hoc, 17 Orang tenaga teknis, 28 Orang tenaga Non Teknis, dan 16 orang tenaga Honorer.
- Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Para Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Kendari telah mengikuti Diklat, Pelatihan maupun Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI melalui *daring, non daring* maupun *blended learning.*
- Pengelolaan keuangan dapat dikatakan bahwa output dari DIPA 01 dan 03 sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran DIPA 01 sebesar 99,18 % dan DIPA 03 sebesar 94,27 % serta diikuti penyerapan PNBP sebesar 100%.
- Pada tahun 2023 pengelolaan sarana dan prasarana gedung serta fasilitas kantor lainnya telah diupayakan sehingga tercipta tata kelola sarana prasarana yang baik dan nyaman serta dilengkapi dengan beberapa fasilitas pelayanan baru seperti ruang *broadcast* dan arena bermain anak.
- Pengadilan Negeri Kendari telah aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun Badilum secara *daring* atau online (zoom).
- Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan beberapa regulasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan dalam menindaklanjuti Peraturan-peraturan, SEMA, Perma dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI selama tahun 2023.

- Pengadilan Negeri Kendari telah menerapkan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan pengadilan melalui satu pintu yang didukung dengan berbagai inovasi aplikasi pelayanan yang memudahkan untuk memberikan pelayanan.
- Pengadilan Negeri Kendari telah menerapkan aplikasi E-Court dengan fitur *e-filling* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan pihak secara elektronik), *e-litigasi* (persidangan secara elektronik).
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan baik internal maupun Pengawasan Rutin oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maupun dari Badan Penagwas Mahkamah Agung telah dilaksanakan dengan baik diikuti dengan hasil temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan baik dalam bentuk laporan.

Selain capaian-capaian yang disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Kendari juga masih memiliki beberapa kendala yang menjadi perhatian bersama kedepannya yakni kurangnya Sumber Daya Manusia pada bagian kesektariatan, beban pekerjaan tidak sesuai dengan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga beberapa pegawai yang merangkap tugas. Begitu pula kesiapan sarana dan prasarana perkantoran yang perlu ditingkatkan karena fasilitas yang tersedia sekarang ini tidak memadai dengan semakin bertambahnya masyarakat pencari keadilan ataupun masyarakat dengan keperluan administrasi lainnya di Pengadilan Negeri Kendari sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih memadai salah satunya yaitu Ruang Sidang Anak yang belum memenuhi standar Ruang Pengadilan Anak. Fasilitas Rumah Dinas Hakim yang sangat tidak layak bagi Pejabat Tinggi Negara karena keterbatasannya anggaran yang diberikan pada Pengadilan Negeri Kendari.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Kendari maka perlu dilakukan antara lain :

1. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan/renovasi gedung kantor dan rumah dinas serta fasilitas perkantoran lainnya.
2. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Diklat/Pelatihan sesuai dengan formasi masing-masing.

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI KENDARI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI
Nomor 325/KPN.W23-U1/SK.OT1.2/XII/2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI

KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Tahunan pada Pengadilan Negeri Kendari Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2023;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2023;

c. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I;
13. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1809/DJU/OT1.2/XII/2023 tentang Permintaan Data Perkara untuk Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023;
14. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4108/SEK/OT.6/12/2023 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI**

Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor W23-U1/265/OT.1.2/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2023 Pada Pengadilan Negeri Kendari;

Kedua : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2023;

Ketiga : Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2023 mempunyai tugas :

1. Menginventarisir dan menyusun Laporan Tahunan Tahun 2023 dari sub bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam lingkungan unit kerja Pengadilan Negeri Kendari;
2. Menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kendari sesuai *outline* Laporan Tahunan sehingga menjadi laporan kegiatan yang akurat, lengkap dan tepat sasaran;
3. Laporan dibuat dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sesuai jadwal yang ditetapkan.

Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2023 ini;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI

SUGENG SUDRAJAT

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendari
Nomor 3225/KPN.W23-U1/SK.OT1.2/XII/2023
Tanggal 29 Desember 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI

NO	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1.	SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H. NIP. 19740830 1999031005	Ketua Pengadilan Negeri Kendari	Pembina I
2.	H BUDI WINATA, S.H., M.H. NIP. 197305221999031001	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari	Pembina II
3.	ARMIN, S.H., M.H. NIP. 196512311989031036	Panitera	Penanggung Jawab Kepaniteraan
4.	Hj. ROSDIANA L, S.E. NIP. 196601021996032001	Sekretaris	Penanggung Jawab Kesektariatan
5.	AKIRA HASBULLAH ISAMU, S.E. NIP. 198111182009041002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Ketua
6.	ASRI NURUL UTAMI, S.A.P. NIP. 199501092022032004	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
7.	HASRIM, S.H. NIP. 197304241993031006	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	MUHAMMAD SAIN, S.H., M.H. NIP. 196910241992031001	Panitera Muda Perdata	Anggota
9.	DARWIS, S.H. NIP. 198301032009121006	Plt. Panitera Muda Hukum	Anggota
10.	DJAYADI, S.H. NIP. 196810151989031004	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota
11.	BERNADETHE NISAWATY, S.H., M.H. NIP. 197208111999032003	Panitera Muda Khusus PHI	Anggota
12.	WA ODE NUR IQAMAH, S.T. NIP. 198412182009042009	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
13.	MISRAWATI, S.E., M.A.P. NIP.198503162009042004	Plt. Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI

SUGENG SUDRAJAT